

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : OKTOBER 2022

18 TAHUN DPD RI
Katalisator Perjuangan
Daerah

Kasus BLBI Membuat
***Chaos* Keuangan Negara**

Varia Senat ■
Mafia Tanah
Harus Diberantas

Sekretariat Jenderal ■
Penghargaan dari
Menteri Keuangan

Opini ■
Menyoal Soliditas
Kepemimpinan
DPD RI

KAJI ULANG
BBM BERSUBSIDI!



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan



★ ★ ★ ★ ★
**DIRGAHAYU TENTARA NASIONAL
INDONESIA KE 77**

5 Oktober 2022



SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT

Rahman Hadi
Lalu Niqman Zahir
Sefti Ramsiaty

PEMIMPIN UMUM / PENANGGUNG JAWAB

Mahyu Darma

PEMIMPIN REDAKSI

Taufik Jatmiko

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Fitra Helmi

REDAKTUR FOTO

Rima Octaviani Dwiarti

SEKRETARIS REDAKSI

Theresia Oktavina

STAF REDAKSI

Betria Eriani, Adhelia Larasati
Mas Aryo Kristiyanto, Arso P. Nugroho
Adhita Zehan, Fandi Tri Prayogo
Nanda Russia Rola

FOTOGRAFER

N. Nurdianto, Lela Sadiyah
Dimas Yulian Santoso, Haryo C. Wicaksono
Zaeki Adrian, Andrianto,
Surya Pongsitanan, Arifin Nur Wijaya,
Prabandaru Ega Baskoro
Fikri Muftih Akbar, Mujiono
Unang Gunawan, Ryan Nur Fajry

NARASUMBER / KONSULTAN MEDIA

Syafruddin Al, Syafril Amir, Bobby Lukman,
dan Nuryanto (Desain Grafis)

DISTRIBUSI

Bagian Pemberitaan & Media DPD RI

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1
Gedung B DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat 10270
Email : keranjang.senator@gmail.com
Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id
// website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri //
FB: www.facebook.com/DPDRI // twitter : @dpdri

Setelah 18 Tahun

Tanggal 1 Oktober menjadi tanggal dan hari yang istimewa bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sebab, pada tanggal itu, pada tahun 2004 silam, untuk pertama kalinya para wakil daerah itu mengucapkan sumpah jabatan sebagai anggota DPD RI dalam sidang paripurna pelantikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

DPD RI lahir dari sebuah kebutuhan akan sistem perwakilan yang lebih representatif. Selama pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Megawati Soekarno Putri, sistem keterwakilan daerah ditetapkan dalam sebuah pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka yang terpilih itu kemudian disalurkan ke dalam Fraksi Utusan Daerah di MPR RI.

Dengan adanya amendemen ketiga tentang perubahan sistem keterwakilan, DPD RI menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem perwakilan dua kamar yang menjadi kebutuhan dalam *statue* ketatanegaraan di Indonesia, buah dari reformasi.

Anggota DPD RI bukan lagi disebut sebagai Fraksi Utusan Daerah di MPR RI, namun menjadi komponen penting nan mandiri yang dipilih secara demokratis dalam sebuah pemilihan umum sebagaimana anggota DPR RI.

Lahir dari proses politik yang panjang nan dinamis, keberadaan DPD RI dimaksudkan untuk menjadi penyeimbang dan mitra DPR RI dalam mewujudkan sebuah tata aturan yang lebih berpihak pada daerah. Sebagai lembaga pembawa aspirasi daerah, keberadaan DPD RI diharapkan mampu menjadi penyambung lidah dan kepentingan daerah dalam artian kewilayahan yang selama ini kurang diakomodir oleh politisi yang bekerja di DPR RI.

Namun dalam praktiknya, DPD RI masih harus menghadapi banyak sekat dan hambatan. Di antaranya adalah persoalan kewenangan yang terbatas. Padahal dalam sistem bikameral, peran DPD RI adalah sebagai lembaga penyeimbang dan ikut serta membahas sebuah *draft* regulasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang lebih baik.

Kini setelah delapan belas tahun berlalu, rasanya perlu kita mengkritik minimnya dukungan politik dari DPR RI untuk menyerahkan sebagian kewenangan dan hak itu kepada para Senator. Sejauh ini, lembaga DPD RI hanya diikutsertakan dalam pembahasan tahap pertama dan kedua. Namun saat memasuki fase krusial yaitu tahap pengambilan keputusan, DPD RI tidak lagi dilibatkan.

Karena itu, usulan untuk menambah kewenangan DPD RI dalam menjalankan perannya terkait penyusunan dan pembahasan UU harus dengan melakukan amendemen kelima sebagaimana selama ini diperjuangkan. DPD RI harus diperkuat untuk bisa memperjuangkan kepentingan daerah. Semoga. (*)

SENAT UTAMA

6



- Kaji Ulang BBM Bersubsidi!
- Subsidi itu Amanat Pancasila
- Pemerintah Tak Paham Psikologis Rakyat
Pemerintah Tunjukkan Kelemahannya
Datangi DPD RI Tolak Kenaikan BBM
Perlu Perbarui Data Kemiskinan
Mengapa Malaysia Bisa Lebih Murah?

SENAT KHUSUS

14



- 18 TAHUN DPD RI
Katalisator Perjuangan Daerah
- Hasilkan Ratusan Usulan RUU
- Tahun Ini, DPD RI Usulkan Tiga RUU

NUSANTARA

19



- Sektor Alternatif di Luar Pariwisata
- DPD RI Tak Biayai Kampanye LaNyalla
- Kualitas Pemilu Tak Boleh Berkurang!
- Perbaiki Bangsa, Murnikan Demokrasi
- Yang Tak Lolos, Mengadu ke DPD RI
- Rekonsensus Nasional untuk Kemurnian Pancasila
- Try Sutrisno Dukung Rekonsensus Nasional
- Mencegah Kebocoran, Selamatkan Data Rakyat
- Jangan Gadaikan Kedaulatan Rakyat
- Pemerintah Perlu Anggarkan Bantuan Khusus
Pengendali Inflasi di Daerah
- UU MLA Bisa Atasi Krisis Keuangan Negara
- Bangsa Ini Jangan Wariskan Generasi Lemah
- Banyak Perusahaan Akali Sistem *Outsourcing*
- Diplomasi Bakso Ala Sultan

VARIA SENAT

35



- Mafia Tanah Harus Diberantas

- Jangan Ada Nepotisme Pengangkatan Honorer
- Membahas Pemilu Serentak dan Pilkada 2024
- Kaji Ulang Kenaikan Harga Tiket Pesawat
- Belum Semua Provinsi Miliki Rumah Sakit Jiwa
- Bunga Kredit Ultra Mikro Mencekik
- Permudah UMKM Dapatkan KUR
- Pengaduan Konflik Tanah Terus Mengalir ke DPD RI
- Blok Masela Hanya Diganti Rp14 Ribu/Meter
- BULD Soroti Masalah Perizinan Tambang di Daerah
- BKSP DPD RI Gelar Forum Sinergi Dubes dan Daerah
- Kasus BLBI Membuat *Chaos* Keuangan Negara

SEKRETARIAT JENDERAL

52



- PENGHARGAAN DARI MENTERI KEUANGAN
- Sekjen DPD RI Terima Delegasi Arab Saudi
- Raker dengan Komisi III, Ada Tambahan Belanja?

KAJIAN DAERAH

56

- PERSIAPAN MENGHADAPI RESESI EKONOMI DUNIA
(Analisis Legislatif di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran-
Setjen DPD RI/rindang2401@gmail.com)
Oleh: Rindang Mustikawati

OPINI

58



- Menyoal Soliditas Kepemimpinan DPD RI

SENAT KITA

60



- Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si., M.Kesos:
Senator Muda dari Papua Barat

GALERI

62





Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto menyerahkan hasil Komite IV berisi pertimbangan terhadap RUU APBN 2023 kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-1 DPD RI. (Foto Setjen DPD RI).

KAJI ULANG BBM BERSUBSIDI!

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyarankan pemerintah untuk mengkaji kembali penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga tidak membebani rakyat.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto ketika memberikan beberapa pertimbangan terhadap RUU APBN 2023 dalam Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-1 DPD RI, Selasa, pekan ketiga September 2022 menegaskan, subsidi kepada rakyat merupakan kewajiban pemerintah atas amanat konstitusi.

Pernyataan Sukiryanto disambut baik oleh sejumlah anggota DPD RI. Senator asal Provinsi Riau Edwin Pratama Putra menyayangkan sikap pemerintah yang selalu menyesuaikan harga BBM dengan kenaikan harga minyak dunia, namun tidak berlaku sebaliknya apabila harga sedang turun.

“Beberapa waktu lalu tren harga minyak dunia sempat turun, oleh karena itu sebaiknya DPD RI mengajukan

usulan tegas agar harga BBM dapat ikut diturunkan di saat harga minyak dunia turun,” ujar Edwin.

Senator asal Provinsi Sulawesi Selatan Tamsil Linrung juga tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi pada tanggal 3 September 2022 lalu karena menambahkan beban rakyat dalam kondisi yang serba sulit ini.

“Sangat tidak elok pemerintah menaikkan harga BBM. Kita semua harus pahami bahwa subsidi BBM adalah kewajiban negara bukan beban negara. Karena dampak buruk apabila subsidi dicabut terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok dan transportasi yang tentunya akan memberatkan masyarakat,” tutur Tamsil. (*)



Pimpinan DPD RI saat mengikuti Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-1 DPD RI. (Foto Setjen DPD RI).

Subsidi itu Amanat Pancasila



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-1 DPD RI, Selasa, pekan ketiga September 2022. (Foto Setjen DPD RI).

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti secara tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 3 September 2022.

Menurut LaNyalla, yang harus dihapus itu adalah korupsi, bukan subsidi. Karena subsidi adalah amanat Pancasila dan tertulis di pembukaan konstitusi sebagai bagian dari cita-cita dan tujuan nasional negara ini.

“Negara ini lahir untuk melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hal itu dilakukan dengan memastikan rakyatnya tidak semakin menderita dan miskin,” tegas LaNyalla, Minggu, awal

September 2022.

Ditegaskan LaNyalla, kenaikan harga BBM bersubsidi akan membuat rakyat semakin menderita dan menambah jumlah rakyat kemiskinan. Maka kebijakan itu tidak boleh ditempuh pemerintah. Apalagi diyakini bantuan langsung tunai (BLT) belum 100 persen menjawab persoalan.

“Seolah-olah subsidi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak itu optional atau pilihan, bisa dicabut sebagai pilihan. Itu karena kita memahaminya sebagai subsidi. Padahal itu kewajiban negara. Apakah nanti BLT juga akan terus-menerus? Mungkin tidak juga. Jadi perlahan-lahan bisa dihentikan juga,” kata LaNyalla. (*)

PEMERINTAH TAK PAHAM Psikologis Rakyat

Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengabaikan psikologis rakyat yang saat ini sedang tertatih untuk pulih dan bangkit dari hantaman pandemi.

Rakyat saat ini masih dalam tahap mengumpulkan tenaga, energi, semangat dan berupaya memaksimalkan segala potensi yang dipunya-nya untuk memulihkan diri setelah dihantam badai dahsyat pandemi Covid-19.

Karena itu, Anggota DPD RI Fahira Idris menilai, situasi saat ini tidak tepat menaikkan harga BBM bersubsidi. "Menaikkan harga BBM bukan hanya menambah beban hidup, tetapi juga meningkatkan tensi rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerin-tah," kata Fahira, Senin pekan kedua September lalu.

Idealnya, kata Fahira, prioritas pemerintah saat ini bukan menaikkan harga, tetapi segera me-rampungkan aturan teknis ketentuan kelompok masyarakat yang berhak menggunakan Jenis

BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Pe-nugasan (JBKP) Peralite.

Jika aturan teknis ini disempurnakan, maka pe-nyaluran BBM bersubsidi akan lebih tepat sasaran sehingga tidak terlalu membebani APBN. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan penegak hukum ter-utama dengan penggunaan teknologi informasi yang paling mutakhir. Begitu saran Fahira. (*)



Anggota DPD RI Fahira Idris (Foto Setjen DPD RI)

Pemerintah Tunjukkan Kelemahannya



Anggota DPD RI Hilmy Muhammad (Foto Setjen DPD RI)

Anggota DPD RI Hilmy Muhammad mengkritisi salah satu alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yaitu karena masih terdapat 70 persen masyarakat mampu yang menggunakannya.

Alasan pemerintah itu dinilai senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pendistribusian BBM bersubsidi sehingga dikonsumsi oleh masyarakat mampu.

Semestinya subsidi yang tidak tepat sasaran ini menjadi fokus paling utama pemerintah daripada menaikkan harga BBM bersubsidi. Dengan menaikkan BBM maka semuanya terkena imbasnya. Kesalahan sebagian orang ditimpakan ke

semua orang.

“Jangan-jangan ini dibiarkan. Karena setiap kali kenaikan harga BBM alasan ini terus menerus direpetisi. Juga menjadi kecurigaan kita, mengapa harus mengadu domba antara si mampu dan yang tidak mampu,” kata Hilmy, Senin pekan kedua September 2022.

Hilmy melihat upaya pengawasan dalam pendistribusian BBM bersubsidi melalui aplikasi *MyPertamina* adalah suatu langkah yang tepat. Namun dia menyangkan, aplikasi tersebut baru diaktifkan setelah kenaikan BBM berubsidi. “Ini belum ada hasilnya harga BBM sudah dinaikkan. Ini menjadi pertanyaan kita, apakah tidak dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik?” kata Hilmy mempertanyakan.(*)

Datangi DPD RI Tolak Kenaikan BBM



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gabungan Aktivis Lintas Elemen yang menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. (Foto Setjen DPD RI)

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gabungan Aktivis Lintas Elemen mendatangi DPD RI, Selasa pekan kedua September 2022. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah meminta DPD RI mendukung gerakan rakyat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kami ini merupakan representasi rakyat di daerah. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM direspon oleh gelombang penolakan rakyat di seluruh daerah. Kami meminta agar DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla untuk mendukung gerakan rakyat tersebut,” kata Haris Rusli Moti, aktivis Petisi 28.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tetap konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat. LaNyalla menyebut kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin menderita dan menambah jumlah kemiskinan.

“Negara ini lahir untuk melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hal itu dilakukan dengan memastikan rakyatnya tidak semakin menderita dan miskin,” tegas LaNyalla. (*)

Perlu Perbarui Data Kemiskinan



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Setjen DPD RI)

Pemerintah harus memiliki alasan kuat berbasis data dalam mengambil kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai salah sasaran ke kompensasi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat tidak mampu.

Karena itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah memperbarui definisi standar kemiskinan dan data kemiskinan saat ini. Sebab, banyak metode dan standar yang digunakan untuk mengukur kemiskinan. BKKBN mempunyai kriteria kemiskinan sendiri, World Bank juga. Bahkan BPS pun menggunakan konsep garis kemiskinan atau *poverty line* yang berbeda pula.

“Metode pengukuran angka kemiskinan ini harus konsisten untuk menghasilkan data jumlah penduduk miskin dengan lebih tepat. Data inilah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program pengentasan kemiskinan melalui kompensasi dan lainnya,” kata senator dari Bengkulu itu, Selasa pekan kedua September 2022.

Ditekankan, penyajian data yang tidak konsisten dan tidak sesuai

dengan kondisi riilnya akan berdampak pada rendahnya efektifitas program. Data yang tidak tepat juga menyebabkan efisiensi anggaran kemiskinan yang rendah.

“Pemerintah daerah juga harus aktif melakukan pembaruan data kemiskinan secara rutin. Harus disesuaikan dengan potensi tekanan inflasi dan sesuai standar pemenuhan kebutuhan pokok bulanan di setiap daerah,” kata Sultan. (*)

PERBANDINGAN HARGA BBM

**INDONESIA****PERTAMINA****HARGA BBM PERTAMINA
(per liter)**

◆ Peralite	Rp 10.000
> Pertamax	
	Rp 13.900 - Rp 14.200
> Pertamax Turbo	
	Rp 15.900 - Rp 16.600
> Pertamax Dex	
	Rp 17.400 - Rp 18.100
> Dexlite	
	Rp 17.100 - Rp 17.800

INDONESIA memberikan subsidi pada produk BBM dengan kualitas lebih rendah seperti solar dan bensin dengan nilai oktan (RON) 90 atau Peralite.

**MALAYSIA****PETRONAS****HARGA BBM MALAYSIA
(per liter)**

◆ RON 95	RM 2.05
	(Sekitar Rp 6.642)
◆ RON 97	RM 4.30
	(Sekitar Rp 13.284)
◆ Diesel	RM 2.15
	(Sekitar Rp 6.657)

MALAYSIA memberikan subsidi pada produk BBM dengan kualitas dan nilai oktan lebih tinggi dibandingkan Indonesia yakni RON 95.

Sumber: Sindonews.com



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (bertopi/tengah) didampingi Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir pada peringatan 18 Tahun DPD RI di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu awal Oktober ini. (Foto: Sesjen DPD RI).

18 TAHUN DPD RI

Katalisator Perjuangan Daerah

Sabtu, 1 Oktober 2022, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) genap berusia 18 tahun. Lembaga negara yang menjadi kamar kedua parlemen Indonesia itu lahir 1 Oktober 2004 setelah amendemen ketiga Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Pada peringatan HUT ke-18 DPD RI di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,

Minggu pekan pertama Oktober ini, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyebutkan lembaga yang di-pimpinnya itu akan terus memperjuangkan kepentingan daerah. Sejak lahir di tahun 2004, DPD RI terus memperjuangkan aspirasi seluruh daerah. Dan di usia ke-18 tahun ini, akan menjadi momentum DPD RI dalam penguatan perjuangan aspirasi daerah.



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat memberikan sambutan pada HUT ke-18 DPD RI di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Sesjen DPD RI).

“Usia 18 tahun adalah perjalanan ruang dan waktu yang diisi dengan produktivitas, kerja yang tak kenal lelah untuk menjadi jembatan aspirasi bagi rakyat yang ada di lereng gunung, di pesisir, di kota dan desa. Mereka adalah kaki-kaki penopang bagi kita, dan kita adalah bahu bagi mereka untuk memanggul beban aspirasi rakyat untuk diperjuangkan di gedung ini,” ucap Nono Sampono.

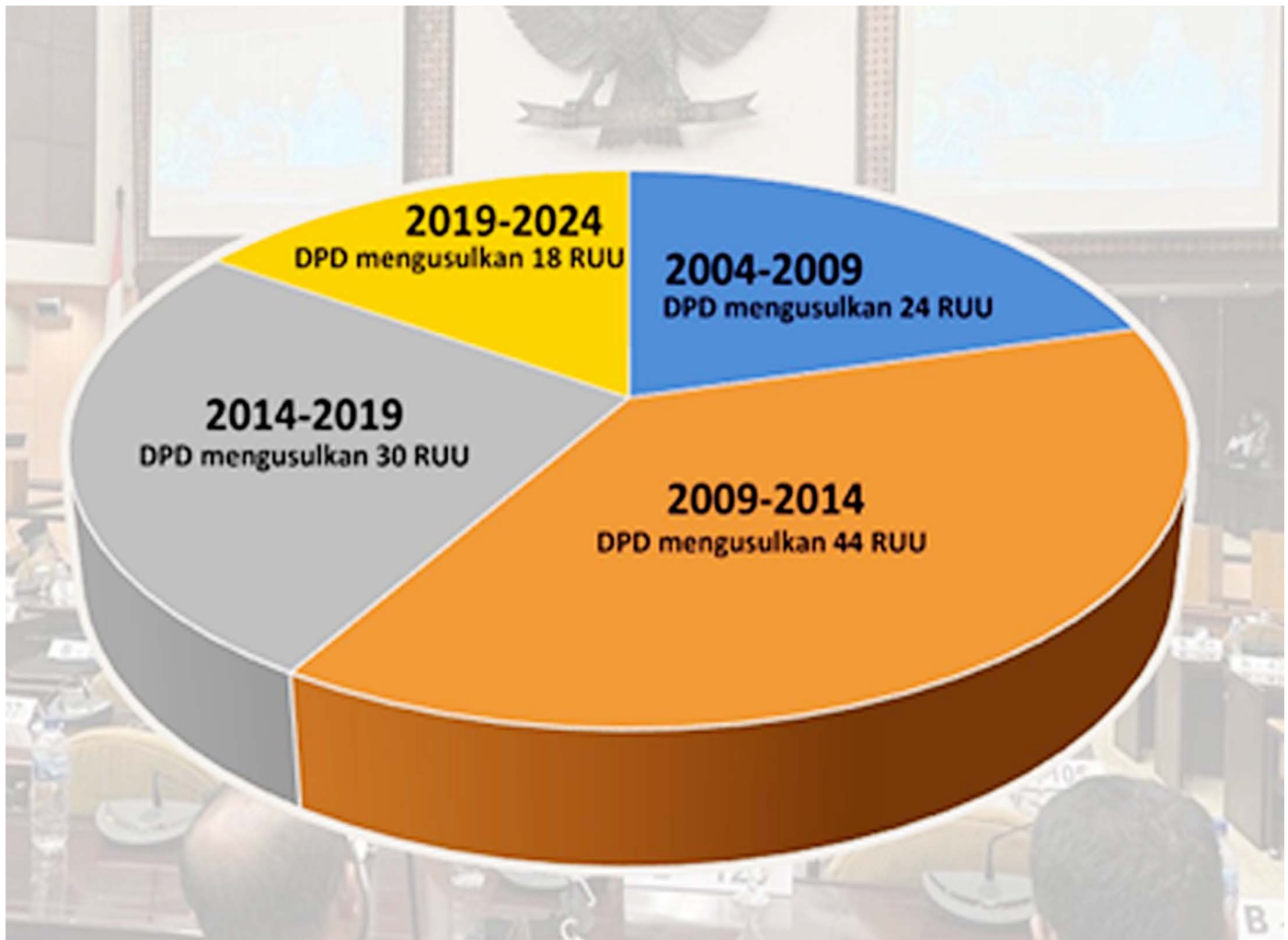
Nono menambahkan, DPD RI akan terus menjadi katalisator perjuangan aspirasi rakyat dan dinamisator bagi terselenggaranya program serta kebijakan pemerintah yang ditujukan pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Hal tersebut merupakan upaya DPD

RI dalam mewujudkan tujuan yang terdapat dalam UUD 1945.

Nono pun mengucapkan selamat kepada DPD RI yang telah menginjak usia 18 tahun di tanggal 1 Oktober 2022. Dirinya berharap agar di usia tersebut dapat menjadi momentum untuk semakin memperkuat kebersamaan.

Perayaan HUT ke-18 DPD RI dilakukan dalam berbagai kegiatan, seperti lomba essay mahasiswa bertema “Catatan Perjalanan DPD RI Ke-18 Tahun”, lomba *microsite* kantor daerah, lomba mewarnai anak-anak, dan lomba video senam GerMas antar Biro/Pusat dan kantor daerah. (*)

Hasilkan Ratusan Usulan RUU



Resmi menjadi lembaga negara dalam sistem bikameral sebagaimana hasil amendemen ketiga UUD 1945, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pertama kali bersidang pada tanggal 1 Oktober 2004 di Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Sejak itu, DPD RI terus menjalankan fungsi sesuai kewenangan yang dimilikinya. Hingga sekarang, DPD RI telah menghasilkan 1107 keputusan yang terdiri dari pandangan DPD RI, pertimbangan DPD RI, usulan Rancangan Undang Undang (RUU), rekomendasi serta hasil pengawasan yang disampaikan baik kepada Presiden, DPR RI, Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya.

Dari 1.107 keputusan DPD RI tersebut, DPD RI

juga telah menghasilkan dan mengusulkan ratusan RUU inisiatif DPD RI untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah secara tripartit. DPD RI memberikan usulan berupa RUU sebanyak 18 usulan yang berupa RUU terkait Pengelolaan Keuangan Negara, Pemilihan Kepala Daerah serta RUU yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup, Energi serta Penanggulangan Bencana.

Pada tahun 2020 silam, salah satu RUU usulan DPD RI disahkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Tentang Kelautan yang mendapat apresiasi berbagai pihak sebagai UU inisiatif untuk pengelolaan laut dengan sumberdayanya yang melimpah (*)

Tahun Ini, DPD RI Usulkan Tiga RUU



Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI mengusulkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2023.

Ketua PPUU DPD RI Dedi Iskandar Batu-bara menyerahkan tiga RUU untuk Prolegnas 2023 kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat rapat di Baleg DPR RI. (Foto Setjen DPD RI)



Pimpinan PPUU DPD RI saat mengikuti rapat kerja pembahasan Prolegnas tahun 2023 di Baleg DPR RI. Dari kiri Wakil Ketua M Afnan Hadikusumo, Ketua Dedi Iskandar Batubara dan Wakil Ketua Aji Mirni Mawarni. (Foto Setjen DPD RI)

Usulan tersebut disampaikan pada rapat kerja antara DPR RI, DPD RI dan Pemerintah, Selasa pekan keempat September 2022.

Ketiga RUU tersebut adalah RUU Perubahan Atas UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, RUU Perubahan Kedua Atas UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan, dan RUU tentang Pemerintahan Digital.

“Ketiga usulan RUU itu dapat menambah jumlah RUU Prolegnas Prioritas dari DPD RI. Mengingat sejak tahun 2019 hingga kini belum satupun RUU inisiatif

DPD RI yang kunjung dibahas, apalagi menjadi UU,” tegas Ketua PPUU DPD RI Dedi Iskandar Batubara.

“

Sejak 2019 hingga kini, belum satupun RUU inisiatif DPD RI dibahas apalagi disahkan menjadi UU.

”

DPD RI menilai, salah satu kelemahan dalam penyusunan Prolegnas antara lain karena adanya ego sektoral antarlembaga dan kementerian. Setiap persoalan harus

diselesaikan dengan membentuk UU. Akibatnya, terjadi tumpang-tindih atau *over regulated* terhadap suatu bidang tertentu.

“Karena itu DPD RI mendukung kebijakan Prolegnas benar-benar diarahkan kepada RUU tepat guna dan tepat sasaran, sehingga desain Prolegnas akan terlihat lebih efisien dan efektif. Tidak obesitas dan lambat merespon kebutuhan hukum masyarakat dan pemerintah sebagai lembaga eksekutif,” kata Dedi Iskandar dalam Rapat Panja Penyusunan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2023 di Baleg DPR RI, Selasa pekan kedua September 2022. (*)

Sektor Alternatif di Luar Pariwisata

Sektor Pariwisata menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi Provinsi Bali selama ini. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 sampai 2022, telah memukul ekonomi provinsi yang menjadi etalase pariwisata Indonesia itu.



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin didampingi sejumlah senator menyerahkan cenderamata kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Badung I Nyoman Sujendra usai *Focus Group Discussion* (FGD) bertajuk “Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Badung Melalui Sektor Pariwisata Andalan Dengan Penguatan Sektor-sektor Ekonomi Alternatif” di Badung, Bali, Jumat, pekan pertama September 2022. (Foto Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin meminta Provinsi Bali, utamanya Kabupaten Badung yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi Provinsi Bali di sek-

tor pariwisata, untuk mengembangkan sektor lainnya di luar pariwisata sebagai salah satu solusi.

“Kita semua harus bergerak dan berpikir lebih cepat agar bisa segera

ke luar dari situasi ini. Solusinya adalah memperkuat sektor-sektor alternatif selain pariwisata,” kata Mahyudin saat menyampaikan *keynote speech* pada *Focus Group Discussion* (FGD) bertajuk “Upaya

Percepatan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Badung Melalui Sektor Pariwisata Andalan Dengan Penguatan Sektor-sektor Ekonomi Alternatif” di Badung, Bali, Jumat, pekan pertama September 2022.

Asisten Bidang Pemerintahan

dan Kesra Kabupaten Badung I Nyoman Sujendra mengakui, pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran betapa rentan perekonomian Bali jika hanya mengandalkan sektor pariwisata.

“Maka saat ini, Pemkab Badung

tengah berupaya sekuat tenaga untuk melakukan *recovery* dengan berbagai stimulus ekonomi, melalui kebijakan khusus di bidang UKM, pemberdayaan usaha kecil, hingga kebijakan untuk mempermudah investasi,” kata Nyoman Sujendra. (*)



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat menyampaikan *keynote speech* pada *Focus Group Discussion* (FGD) bertajuk “Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Badung Melalui Sektor Pariwisata Andalan Dengan Penguatan Sektor-sektor Ekonomi Alternatif” di Badung, Bali, Jumat, pekan pertama September 2022. (Foto Setjen DPD RI)

DPD RI Tak Biayai Kampanye LaNyalla



Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI Ahmad Nawardi (Foto Setjen DPD RI)

Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI Ahmad Nawardi menegaskan, tidak ada satu rupiah pun anggaran DPD RI yang digunakan untuk membiayai pemasangan *banner* atau *billboard* “LaNyalla for President”.

Penegasan itu disampaikan Ahmad Nawardi menanggapi tuduhan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menuduh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memanfaatkan fasilitas DPD RI

untuk kampanye dirinya melalui pemasangan baliho dan *billboard* di sejumlah lokasi.

“PURT sangat ketat dan detail dalam proses penganggaran. Kita tidak sembarangan. Jika ada anggaran untuk itu, sudah pasti terbaca. Saya sebagai Ketua PURT DPD RI selama dua tahun ini, tidak pernah menganggarkan untuk itu,” tegas Nawardi akhir Agustus lalu.

Ditegaskan, kalau ada yang

pasang baliho LaNyalla *for President*, itu sama sekali bukan dari DPD RI. Dia menduga pihak yang memasang itu dari relawan atau pendukung LaNyalla di daerah-daerah serta atas inisiatif dan biaya mereka sendiri.

“Semua tuduhan itu tidak berdasar dan tak beralasan. Karena, tidak ada satu rupiah pun anggaran DPD RI yang digunakan untuk membiayai pemasangan *banner* atau *billboard* Ketua DPD RI seperti yang mereka tuduhkan,” tegas Nawardi. (*)



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam pertemuan dengan anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, akhir Agustus lalu. (Foto Setjen DPD RI)

Kualitas Pemilu Tak Boleh Berkurang!

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berharap masalah kemungkinan adanya kekurangan anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 jangan sampai mengurangi kualitas pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Sebab, kualitas dari pemilu dan pilkada itu lebih ditentukan oleh integritas dan kredibilitas penyelenggaranya,” kata Nono dalam pertemuan dengan anggota KPU dan Bawaslu Kabu-

paten Kepulauan Aru, Maluku, akhir Agustus lalu.

Karena itu, Nono meminta KPU dan Bawaslu Kepulauan Aru untuk tetap mempertahankan netralitas serta konsisten dalam melakukan sosialisasi secara intens. Kemudian melakukan akurasi dan pemutakhiran data pemilih secara akuntabel.

“Pemerintah bersama penyelenggara pemilu disebut harus memastikan kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses data pe-

milih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian menggugah kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data kependudukan dan melaporkan jika ada kesalahan pendataan pemilih,” tegas Nono.

Nono juga berharap permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 harus dijadikan bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti sebagai upaya meminimalisir terjadinya permasalahan yang berulang pada saat Pemilu 2024. (*)

Perbaiki Bangsa, Murnikan Demokrasi



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama pengurus PW Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumatera Utara. (Foto Setjen DPD RI)

Untuk memperbaiki bangsa ini yang sudah karut marut, tidak cukup hanya dengan membenahi hukum, birokrasi dan sektor-sektor lain, tapi hanya bisa diperbaiki dengan memurnikan kembali demokrasi.

“Artinya, mengembalikan demokrasi yang selama ini digenggam kalangan oligarki yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti

luhur,” tegas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberikan orasi kebangsaan dalam Sarasehan Nasional Kebangsaan dan Pelantikan PW Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumatera Utara, Sabtu, akhir Agustus lalu.

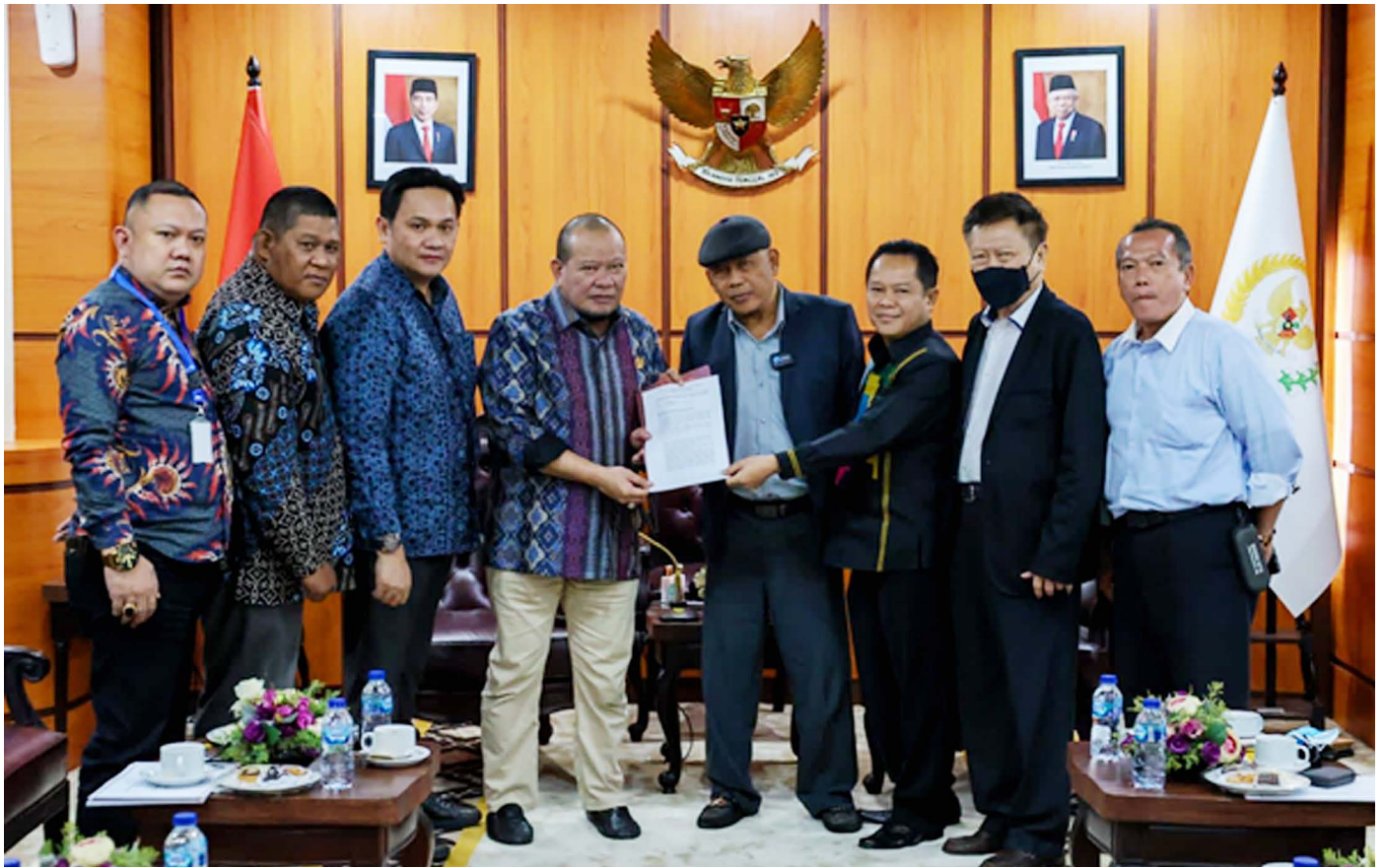
Jika hanya membenahi Indonesia yang sudah karut marut dan salah arah ini hanya diawali dengan membenahi hukum, mem-

benahi ekonomi, birokrasi dan lainnya, itu kata LaNyalla hanya bersifat sektoral dan parsial.

“Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar budayanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter,” katanya.(*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberikan orasi kebangsaan dalam Sarasehan Nasional Kebangsaan dan Pelantikan PW Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumatera Utara, Sabtu, akhir Agustus lalu. (Foto Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima pengaduan 16 partai politik yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024, Jumat pertengahan Agustus 2022. (Foto Setjen DPD RI)

Yang Tak Lolos, Mengadu ke DPD RI

Enam belas partai politik (parpol) yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 mengadu ke DPD RI. Mereka berharap DPD RI melakukan advokasi dan memfasilitasi ke pemerintah dan pihak terkait supaya keluhan mereka diklarifikasi.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembalikan berkas dokumen pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 kepada 16 partai politik. Sebab, tidak bisa melengkapi dokumen pendaftaran hingga berakhir masa

pendaftaran.

Ke-16 parpol itu adalah Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Indonesia Bangkit Bersatu, Partai Karya Republik (PAKAR), Partai Persatuan Bangsa (PPB), Partai Bhineka Indonesia, Partai Pandu Bangsa, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa), Partai Masyumi, Partai Damai Kasih Bangsa, Partai Kedaulatan, Partai Kongres, Partai Pelita, Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), dan Partai Reformasi.

“Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dari KPU ini yang menjadi kendala kami. Sipol inilah yang akhirnya membuat 16 parpol ini tidak lolos,” keluh Eggi Sudjana dari PPB kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang menerima mereka, Jumat pertengahan Agustus 2022.

LaNyalla berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan meminta Komite I DPD RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Kemenag, Bawaslu, Kemenkumham dan DKPP. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menyampaikan *keynote speech* dalam Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45, bertema “Kaji Ulang UUD 1945 Hasil Amandemen Menuju Kembali ke UUD 1945”. (Foto Setjen DPD RI)

Rekonsensus Nasional Untuk Kemurnian Pancasila

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menawarkan gagasan rekonsensus nasional untuk mengembalikan sistem demokrasi Pancasila melalui UUD 1945 ke naskah asli, yang kemudian disempurnakan dengan cara *adendum*

Disebut LaNyalla, masih banyak elemen masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa perubahan konstitusi yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 telah mengubah hampir 95 persen pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945.

Perubahan konstitusi itu sama artinya dengan membubarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 karena telah menghilangkan nilai perjanjian luhur bangsa Indonesia dengan menghapus dokumen sebagai identitas nasional serta menghilangkan nilai proklamasi sebagai suatu kelahiran baru.

Untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya itu, telah menyusun buku ‘Peta Jalan Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat’ dengan harapan dapat menjadi kesepakatan bersama untuk dipedomani.

“Kita tidak bisa terus-menerus seperti ini mengikuti sistem yang tidak cocok dan tidak tepat untuk bangsa yang super majemuk ini. Saya berharap gagasan kembali kepada UUD 1945 naskah asli terus diresonansikan sehingga menjadi kesadaran bersama seluruh anak bangsa,” kata LaNyalla saat menjadi *keynote speech* dalam Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45, bertema “Kaji Ulang UUD 1945 Hasil Amandemen Menuju Kembali ke UUD 1945” di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Sabtu pekan ketiga September 2022. (*)

Try Sutrisno DUKUNG REKONSENSUS NASIONAL



Wapres RI ke-6 Try Sutrisno dalam Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45. (Foto Setjen DPD RI)

Wakil Presiden RI ke-6 yang juga Ketua Dewan Kehormatan DHN 45, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno mendukung gagasan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berupa rekonsensus nasional untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli.

Rekonsensus harus diawali dengan kaji ulang konstitusi yang merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan. Hal itu dilakukan agar bangsa ini tak lagi mengulang kesalahan pada masa lalu, ketika UUD 1945 naskah asli tak digunakan sebagai

dasar penyelenggaraan negara.

“Kita punya kesalahan masa lalu, ketika pada tahun 1950-1959 kita tak menggunakan konstitusi naskah asli. Akhirnya tokoh TNI menghadap Bung Karno untuk kembali kepada UUD 1945 dengan mengeluarkan Dekrit Presiden,” kata Try Sutrisno dalam Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Sabtu pekan ketiga September 2022.

Try Sutrisno menyebut amende-

men konstitusi yang terjadi pada tahun 1999-2002 banyak kekeliruan. Amendemen itu banyak cacatnya. Yang terjadi itu bukan amendemen, tapi mengubah konstitusi karena sudah tak berdasar pada pembukaan maupun Pancasila itu sendiri.

“Intinya kembali, kita menerima adanya perubahan. Itulah adendum. Dekrit kembali seutuhnya tidak ada tambahan. Sekarang memakai istilah kaji ulang UUD 1945. Arti kaji yang ini mengkaji secara komprehensif materi perubahan empat kali itu. Supaya konsensus menyatu istilah kaji ulang itu,” kata Try Sutrisno. (*)

MENCEGAH KEBOCORAN, Selamatkan Data Rakyat



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. (Foto Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin meminta pemerintah mengambil langkah serius mencegah kebocoran data pribadi masyarakat di Indonesia yang kerap terjadi belakangan ini. Sebab, data pribadi warga itu sangat rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.

Kasus kebocoran data di Indonesia yang kerap terjadi, dinilai Mahyudin sudah dalam taraf memprihatinkan dan harus dihentikan. Apalagi belakangan muncul akun Bjorka, peretas yang diduga secara terang-terangan menjual

berbagai macam data pribadi warga Indonesia.

Karena itu, dia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus pro aktif bersama-sama mengambil langkah konkrit mencegah terus berulangnya kasus kebocoran data tersebut.

“Negara harus hadir dalam kasus ini. Dengan terus berulangnya kebocoran data di Indonesia, jangan sampai negara dinilai lalai melindungi warga

nya,” kata Mahyudin, Sabtu pekan kedua September 2022.

Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkrit dalam melindungi keamanan data pribadi milik publik tersebut, dikhawatirkan akan merusak kepercayaan publik kepada pemerintah terhadap keamanan data ini.

“Pemerintah harus makin memperkuat keamanan siber, karena di masa depan penggunaan ruang digital akan semakin tinggi, baik untuk transaksi ekonomi maupun pelayanan publik,” pungkasnya. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menghadiri Malam Budaya Kongres Perempuan Indonesia 2022, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu pekan kedua September 2022. (Foto Setjen DPD RI)

Jangan Gadaikan Kedaulatan Rakyat

Perempuan Indonesia tidak akan pernah tinggal diam melihat kondisi bangsa ini yang sedang mengalami kerusakan secara terstruktur, mengakibatkan keterpurukan massal dan ancaman kepunahan.

Bangsa ini lahir dengan Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar dan ideologinya. Namun dengan amendemen konstitusi yang dilakukan di awal reformasi, telah menghancurkan harkat dan martabat bangsa ini.

“Perempuan Indonesia menolak individualisme, kapitalisme, liberalisme, materialisme, neoliberalisme dan lainnya. Kekayaan sumber daya alam bangsa ini juga tidak boleh digadaikan. Kedaulatan

rakyat tidak untuk diperjualbelikan,” tegas Ratna Sarumpaet, pada Malam Budaya Kongres Perempuan Indonesia 2022, yang dihadiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu pekan kedua September 2022.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai aspirasi yang disampaikan kaum perempuan dalam kongres itu sejalan dengan perjuangan yang dilakukan

lembaga yang dipimpinnya, yaitu gerakan kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian dilakukan adendum perbaikan.

“Inilah yang saya maksud dengan mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Inilah jawaban untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Kita menggugah kesadaran warga bangsa ini mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah untuk memperjuangkannya,” kata LaNyalla. (*)

Pemerintah Perlu Anggarkan Bantuan Khusus Pengendali Inflasi di Daerah



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin

Inflasi telah menjadi fenomena ekonomi yang terjadi setiap tahun, baik akibat faktor eksternal maupun internal. Lebih utama lagi inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini.

Sejauh ini peran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi masih sangat rendah akibat ketiadaan pagu anggaran khusus yang disiapkan untuk menghadapi inflasi. Pemerintah daerah terpaksa mensiasati intervensi fiskal untuk pengendalian inflasi dengan memanfaatkan pagu anggaran lainnya, seperti memanfaatkan dana tak terduga atau pagu anggaran lainnya dalam APBD.

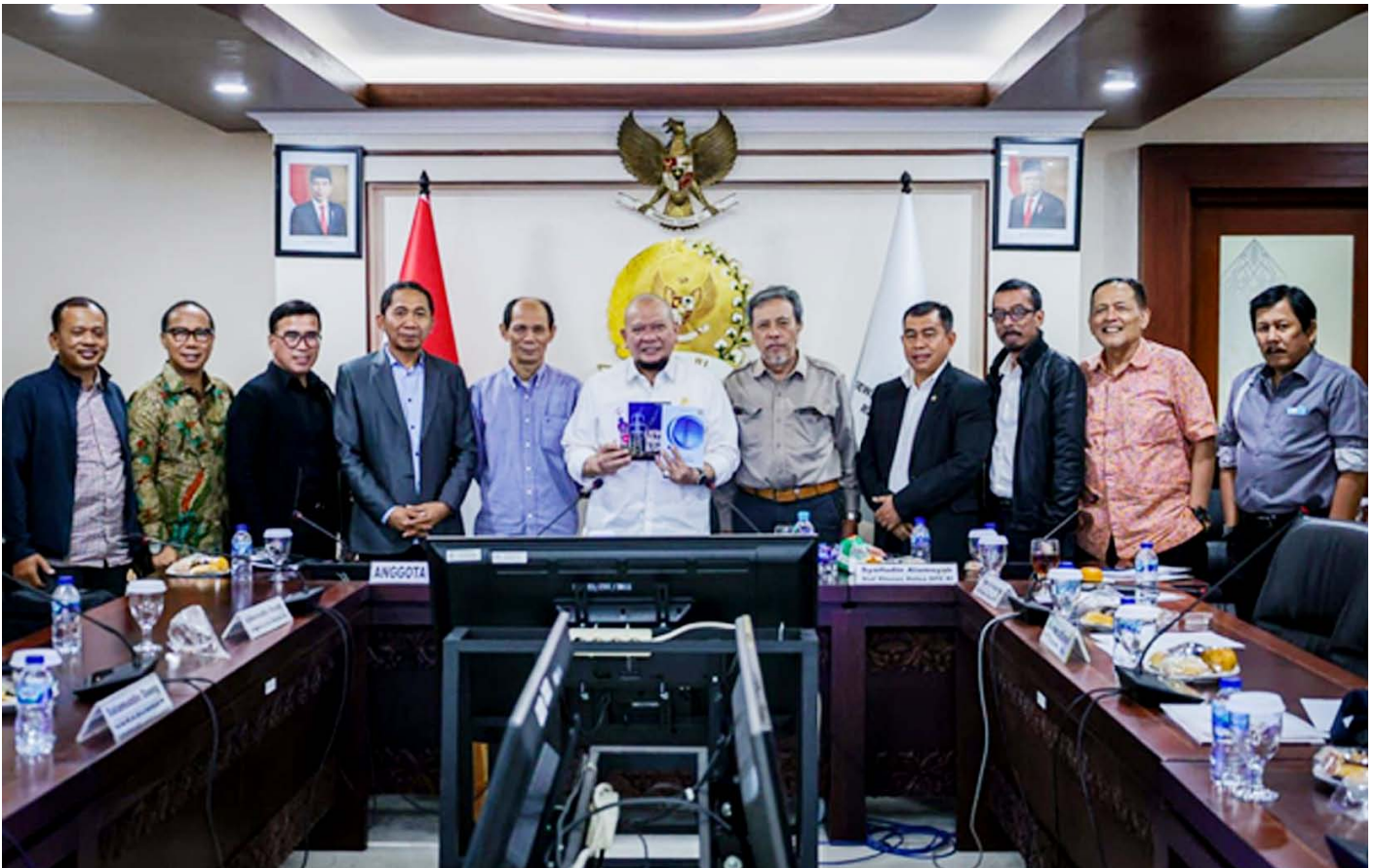
Dengan alasan itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin me-

mintakan pemerintah untuk menganggarkan pagu khusus yang berfungsi sebagai instrumen fiskal bantuan pengendali inflasi dalam Dana Transfer ke Daerah (TKD).

“Respon kebijakan fiskal yang presisi dan tidak rawan terhadap penyalahgunaan anggaran sangat dibutuhkan dalam memastikan pemerintah daerah turut aktif mengendalikan gejolak inflasi sektor pangan dan transportasi di daerah. Kami ingin pemerintah daerah memiliki payung hukum anggaran yang clear, sehingga mereka lebih leluasa dan tidak ragu dalam menganggarkan dana APBD yang bersumber dari TKD sebagai instrumen pengendali inflasi,” kata Sultan, Kamis pekan kedua September 2022.

Dengan demikian, kata Sultan, pemerintah dapat menyalurkan anggaran kompensasi BBM berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan lainnya ke dalam pagu anggaran pengendalian inflasi daerah. Sehingga kepala daerah dapat berperan aktif dalam mengendalikan tekanan inflasi.

“Saya kira akan lebih efektif dan efisien jika bantalan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah gejolak inflasi dialihkan menjadi Dana Bantuan Pengendali Inflasi. Bantalan sosial seperti BLT tidak perlu disubsidi ke orang perorangan, tapi didistribusikan secara kolektif kepada pengelola transportasi publik, logistik dan industri pangan melalui APBD. Sehingga terjadi *burden sharing* fiskal di daerah,” saran Sultan. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama sejumlah pengamat yang menjadi pembicara dalam *executive brief* yang dilaksanakan DPD RI bertema “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli, Khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya”, Senin pekan kedua September 2022. (Foto Setjen DPD RI)

UU MLA Bisa Atasi Krisis Keuangan Negara

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meyakini perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan pemerintah Swiss bisa membantu Indonesia dalam mengatasi krisis keuangan.

Sebab, perjanjian MLA itu sebagai mekanisme menyita uang hasil kejahatan keuangan yang tersimpan dalam rekening rahasia. Apalagi Indonesia juga telah mengesahkan perjanjian MLA tersebut menjadi UU No 5 Tahun 2020 tentang ratifikasi MLA Indo-

nesia dan Swiss.

Jika perjanjian MLA itu dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah, maka Indonesia memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar bagi agenda global, yakni *recovery* ekonomi, digitalisasi dan transisi energi.

“Yang harus kita ketahui, lebih dari 30 triliun dolar AS tersimpan di *back office* tersimpan di surga pajak, dan di rekening rahasia. Jumlah ini merupakan sepertiga dari global *Gross Domestic Pro-*

duct (GDP),” kata LaNyalla dalam *executive brief* yang dilaksanakan DPD RI, Senin pekan kedua September 2022.

Apalagi, kata LaNyalla, Indonesia sebagai G20 Presidensi telah mendapat mandat besar bagi pemulihan ekonomi dunia. Indonesia memiliki kesempatan besar dalam menjalankan semua agenda perubahan global, termasuk transisi energi sebagai salah satu agenda utama G20 Presidensi bagi pemulihan lingkungan dikarenakan sebagai paru-paru dunia. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberikan orasi di acara Liwetan Gawagis dan Ulama Muda Pesantren, di Pondok Pesantren Mambaul Falah, Kabupaten Bandung, Senin pekan ketiga September 2022. (Foto Setjen DPD RI)

Bangsa Ini Jangan Wariskan Generasi Lemah

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan perhatian untuk generasi yang akan datang. Bangsa ini tidak boleh mewariskan generasi yang lemah.

“Islam menganjurkan kita tidak meninggalkan atau membiarkan generasi setelah kita menjadi generasi yang lemah,” kata LaNyalla saat memberikan orasi di acara Liwetan Gawagis dan

Ulama Muda Pesantren, di Pondok Pesantren Mambaul Falah, Kabupaten Bandung, Senin pekan ketiga September 2022.

Generasi lemah yang dimaksud LaNyalla, pertama adalah lemah akidah dan ibadahnya. Alasannya, pertarungan masa depan adalah pertarungan akidah. Generasi mendatang akan dihadapkan kepada kemajuan teknologi dan sekulerisme yang semakin kuat akibat dominasi materialisme.

Kemudian lemah di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Karena kata LaNyalla, pertarungan masa depan dihadapkan kepada kompetisi berbasis latar belakang pendidikan dan keilmuan.

Ketiga yang tidak kalah penting kata LaNyalla adalah jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah ekonominya atau terbelit dalam kemiskinan. Karena kemiskinan dekat dengan kecurfuran. (*)

Banyak Perusahaan Akali Sistem *Outsourcing*



Aksi massa buruh bertajuk 'May Day Fiesta' di Gelora Bung Karno dalam rangka memperingati *May Day* tanggal 14 Mei 2022. Salah satu tuntutan buruh adalah hapusan *outsourcing*. (Foto CNBC)

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menyesalkan masih banyaknya perusahaan yang mengakali sistem *outsourcing* bagi pekerjaannya. Hal tersebut untuk menghindari rasa tanggung jawab pihak perusahaan kepada pekerjanya.

Salah satu bentuk mengakali sistem *outsourcing* yang dilakukan perusahaan, antara lain dengan meng-*outsourcing*-kan pekerjaan permanen atau tetap, serta utama di perusahaan tersebut. Padahal sesuai UU Ketenagakerjaan, pekerjaan yang dikerjakan karyawan *outsourcing* hanyalah jenis pekerjaan sementara dan tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan utama perusahaan.

“Dengan akal-akalan itu, maka banyak karyawan *outsourcing* tidak diangkat sebagai karyawan tetap. Walau telah melaksanakan jenis pekerjaan tetap dan pekerjaan utama perusahaan,” kata Mahyudin saat menerima audiensi Ketua DPD FSP KEP Kaltim/Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum H. Hamka, Minggu pekan kedua September 2022.

Dalam pertemuan itu, Mahyudin berjanji akan menugaskan Alat Kelengkapan (Alkel)

DPD RI yang membidangi ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti aspirasi itu kepada pemerintah. Sehingga perusahaan-perusahaan nakal yang selama ini telah mengakali sistem *outsourcing*, bisa ditertibkan.

“Saya akan menugaskan alat kelengkapan DPD RI, dalam hal ini Komite III untuk segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait sistem *outsourcing* dengan melakukan rapat kerja bersama kementerian dan pihak-pihak terkait,” pungkasnya. (*)



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin (Foto Setjen DPD RI)

DIPLOMASI BAKSO ALA SULTAN



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menjamu makan malam Duta Besar Polandia Beata Stoczynska dan sejumlah anggota parlemen negara tersebut dengan makanan bakso. (Foto Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menjamu Duta Besar Polandia Beata Stoczynska dan sejumlah anggota parlemen negara tersebut dengan menyajikan makanan bakso, salah satu kuliner khas Indonesia, di kediamannya, Rabu pekan keempat September 2022.

Di tengah kondisi hubungan yang cukup panas, utamanya hubungan dagang antara Indonesia dan Polandia saat ini, karena dampak kualitas batu bara yang diekspor ke negara tersebut, seakan-akan menjadi mereda dengan diplomasi bakso ala Sultan tersebut. Dalam suasana perte-

muan yang menyajikan *live music*, Dubes Beata Stoczynska menyanyikan satu lagu bersama Sultan.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada yang mulia sahabat saya Ibu Dubes beserta semua rombongan Parlemen Polandia di kediaman kami ini. Perjumpaan yang istimewa ini kitaawali dengan makan bakso. Dari pertemuan ini diharapkan menghasilkan pembicaraan yang produktif bagi hubungan bilateral, khususnya pada hubungan parlemen antara kedua negara,” kata Sultan.

Kehadiran Dubes dan sejumlah anggota parlemen Polandia membahas masalah energi dan mi-

neral itu ke Indonesia, bersamaan dengan terjadinya masalah dagang Indonesia-Polandia. Masalah tersebut adalah rendahnya kualitas batubara yang diekspor Indonesia yang diprotes Pemerintah Polandia.

“Kami sangat bahagia, sejauh ini hubungan bilateral kita sudah dibangun secara baik di banyak sektor, meskipun saat ini terdapat kesalahan kecil yang patut kami akui. Tapi kami meyakini perjalanan hubungan bilateral kita masih panjang untuk dilewati dengan perasaan saling hormat dan menguntungkan,” kata Sultan disambut senyum dan tepuk tangan para tamu yang hadir. (*)



Pimpinan Komite I DPD RI menyaksikan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menandatangani kesimpulan rapat kerja hari itu. (Foto Setjen DPD RI)

Mafia Tanah Harus Diberantas

Praktek mafia tanah di berbagai daerah masih terus menghantui masyarakat. Diduga banyak oknum yang terlibat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional perlu bertindak.

Komite I DPD RI meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto untuk menyelesaikan sengketa agraria atau pertanahan yang banyak terjadi di daerah. Sengketa itu baik antarmasyarakat, masyarakat dengan perusahaan, atau antarperusahaan.

Sengketa itu disebabkan beberapa faktor, seperti masalah administrasi perubahan fisik dan batas tanah, pemekaran wilayah dan tumpang tindih hak atas tanah karena sertifikat ganda. Fenomena ini memunculkan maraknya mafia tanah di daerah.

Andiara Aprilia Hikmat menyakini banyak oknum yang terlibat dalam permasalahan ini. Mafia tanah dipandang sebagai tindakan kolaboratif antara oknum yang memiliki kewenangan dengan mereka beritikad jahat.

Ketua Komite I DPD RI "Banyaknya oknum yang terlibat untuk memiliki atau me-

nguasai tanah secara tidak sah sehingga merugikan masyarakat dan negara. Karena itu, mafia tanah ini harus diberantas. Ini tergolong kejahatan bersifat *extra ordinary*,” tegas Andiara saat rapat kerja

dengan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Senin pekan kedua September 2022.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto berjanji akan menata kem-

bali berupa struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset, dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. (*)



Suasana rapat kerja antara Komite I DPD RI dengan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Senin pekan kedua September 2022. (Foto Setjen DPD RI)



Komite I DPD RI saat rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. (Foto Setjen DPD RI)

Jangan Ada Nepotisme Pengangkatan Honorer

Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Husein setuju dengan penghapusan tenaga honorer atau non ASN (honorer) adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun sumber daya ASN yang lebih profesional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmennya.

Hanya saja, dia mengin-

gatkan, dalam proses pengangkatan tenaga honorer di daerah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jangan sampai terjadi nepotisme karena akan melahirkan calon ASN yang tidak berkompeten sesuai dengan kebutuhan.

“Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam perekrutan tenaga honorer menjadi PPPK

ini karena masih maraknya nepotisme. Dikhawatirkan akan melahirkan calon ASN yang tidak berkompeten sesuai dengan kebutuhan,” kata Darmansyah dalam rapat kerja dengan Menteri PANRB di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Senator asal Sulawesi Selatan Ajiep Padindang meng-

usulkan agar gaji PPPK tidak menggunakan pendekatan upah minimum, namun didasarkan pada golongan dan jenjang pendidikan.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI Andira Aprilia Hikmat itu,

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah dan pendataannya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Arah kebijakan pengadaan ASN 2023 untuk PPPK refokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Reformasi birokrasi itu harus lincah, cepat dan akan mengubah kebutuhan ASN dari segi kualitas dan kuantitas,” kata Azwar Anas. (*)



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas (ketiga dari kiri) saat rapat kerja dengan Komite I DPD RI. (Foto Setjen DPD RI)



Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo menandatangani kesimpulan rapat disaksikan Pimpinan Komite I DPD RI. (Foto Setjen DPD RI)

Membahas Pemilu Serentak dan Pilkada 2024

Rapat kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas soal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, Selasa akhir Agustus 2024. Rapat tersebut melahirkan lima kesimpulan.

LIMA KESIMPULAN RAKER KOMITE I:

1. Komite I DPD RI bersama Kemendagri sepakat untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 tepat waktu dan tepat anggaran.
2. Komite I DPD RI meminta Pemerintah melalui Kemendagri agar proses dan mekanisme pengisian penjabat (Pj) kepala daerah memperhatikan politik lokal dan kebutuhan daerah, serta lebih mengoptimalkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Komite I DPD RI sepakat dengan Kemendagri untuk melibatkan DPD RI dalam menjalankan 12 agenda utama roadmap pasca pengundangan tiga Undang-Undang Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Komite I DPD RI meminta Pemerintah melalui Kemendagri agar dalam kebijakan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya harus memperhatikan aspirasi orang asli Papua (OAP) dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya dan adat istiadat.
5. Dalam hal pemekaran di Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah diminta untuk memfasilitasi pertemuan dengan Pemda untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah adat di Tambrauw dan Manokwari. (*)

KAJI ULANG Kenaikan Harga Tiket Pesawat



Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai didampingi para wakil ketua saat memimpin rapat kerja dengan Sekjen Kementerian Perhubungan Novie Riyanto Raharjo, Senin pekan ketiga September 2022. (Foto Setjen DPD RI)



Sekjen Kementerian Perhubungan Novie Riyanto Raharjo dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI, Senin pekan ketiga September 2022. (Foto Setjen DPD RI)

Komite II DPD RI meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga tiket pesawat karena dikhawatirkan berdampak pada pelambatan roda perekonomian di daerah-daerah, salah satunya tempat destinasi wisata.

Alasan pemerintah menaikkan harga tiket pesawat terkait dengan harga avtur, yaitu bahan bakar minyak pesawat. Karena itu, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengusulkan kepada pemerintah untuk menghapus tarif pajak pertambahan nilai (PPN) avtur.

“Dengan penghapusan pajak avtur tersebut, harga tiket pesawat bisa normal kembali,” kata senator dari Papua itu dalam rapat kerja Komite II dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto Raharjo, Senin pekan ketiga September 2022.

Senator asal Nusa Tenggara Timur Angelius Wake Kako menilai kenaikan harga tiket pesawat menyulitkan daerah-daerah dalam meningkatkan perekonomiannya. Pemerintah seharusnya bisa memberikan subsidi kepada harga tiket pesawat, sehingga dapat memutar perekonomian di daerah seperti destinasi wisata.

“Saat ini orang Indonesia mending liburan ke Singapura karena tiket pesawat lebih murah. Di negara lain, pemerintahnya memberikan subsidi kepada maskapai sehingga roda perekonomian bisa terus berputar,” kata Angelius.

Sekjen Kementerian Perhubungan Novie Riyanto Raharjo menyebut krisis energi dunia yang terjadi saat ini juga berdampak pada kenaikan harga BBM, salah satunya avtur sebagai penyebab naiknya harga tiket. (*)



Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri (kanan) bersama Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi. (Foto Setjen DPD RI)

Belum Semua Provinsi Miliki Rumah Sakit Jiwa

P enanganan kesehatan jiwa di daerah belum maksimal karena infrastruktur dan sumber daya manusia belum memadai. Hingga saat ini masih ada tujuh provinsi yang belum memiliki rumah sakit jiwa (RSJ), yaitu Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

“Fakta yang tidak terbantahkan, hingga saat ini masih ada tujuh provinsi yang belum memiliki

RSJ,” kata Ketua Komite III Hasan Basri dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pertengahan September 2022.

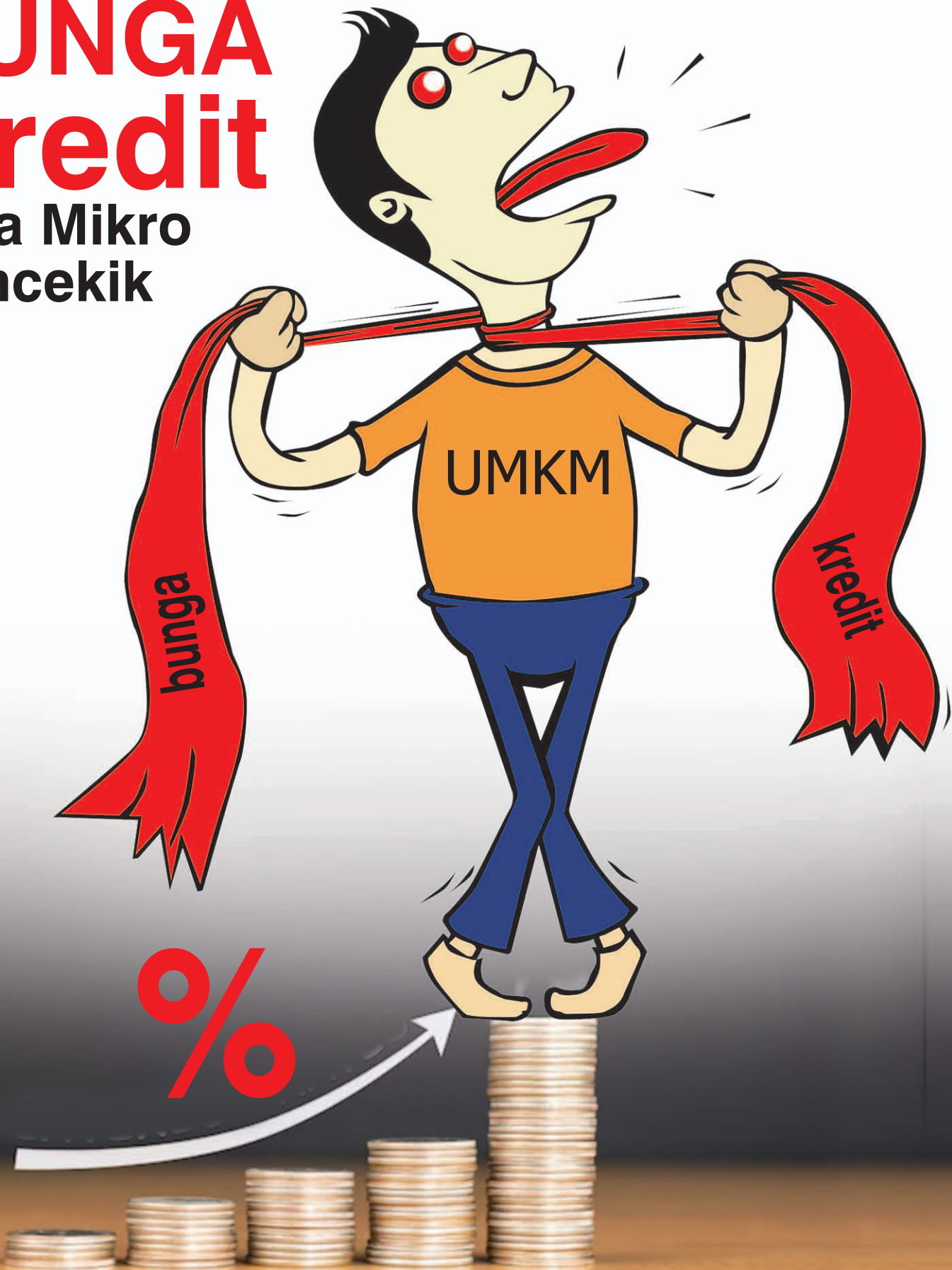
Terkait sumber daya manusia, Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya mengungkapkan, sampai saat ini jumlah psikiater hanya sekitar 1.000 orang saja. Artinya, satu psikiater melayani sekitar 250 ribu penduduk.

Senator asal Lampung, Jihan Nurlela mempersoalkan obat-obatan jiwa pada *e-catalog* dan ketiadaan tempat singgah bagi pasien jiwa yang telah dinyatakan sembuh, terutama bagi yang tidak memiliki keluarga.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Maria Endang Sumiwi mengatakan pihaknya sedang melakukan advokasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Bapeda setempat. (*)

BUNGA Kredit

Ultra Mikro
Mencekik





Anggota Komite IV DPD RI mengunjungi salah satu usaha mikro di Sumatera Selatan dalam kunjungan kerjanya ke provinsi tersebut akhir Agustus 2022 lalu. (Foto Setjen DPD RI)

Komite IV DPD RI menilai suku bunga ultra mikro (UMi) mencekik pelaku usaha mikro. Padahal pembiayaan UMi yang bersumber dari APBN itu merupakan program bantuan sosial untuk usaha mikro pada lapisan terbawah yang belum tersentuh kredit usaha rakyat (KUR).

Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Tamsil Linrung mengungkapkan rasa kecewa dan kesedihannya terhadap pelaku usaha mikro yang harus dihadapkan dengan beban bunga yang tinggi.

“Yang saya sedih, saya tidak berhasil membuat negara hadir untuk mengurangi beban rakyat. Saya berharap mitra kerja memberikan penyaluran dengan bunga yang rendah kepada masyarakat,” kata Tamsil dalam kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Sumatera Selatan yang dipimpin Ketua Komite IV Elviana, Senin akhir Agustus 2022.

Senator dari Jawa Timur Evi



Anggota Komite IV DPD RI mengunjungi salah satu usaha mikro di Sumatera Selatan dalam kunjungan kerjanya ke provinsi tersebut akhir Agustus 2022 lalu. (Foto Setjen DPD RI)

Zainal Abidin juga menyoroti suku bunga ultra mikro yang terlalu tinggi. “Saya sepakat dengan pemerintah saat memberikan keputusan spektakuler memberikan subsidi KUR. Kenapa suku bunga kredit ultra mikro yang diberi subsidi?” tanya Evi dalam kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto, Senin akhir Agustus 2022.

Executive Vice President Bisnis 1 PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) Pusat Sasono Hantarto dalam pertemuan dengan Komite IV DPD RI di Palembang, Sumatera Selatan mengakui bunga kredit UMi memang lebih tinggi. Alasannya, sumber dana PNM berasal dari pasar modal dan pinjaman perbankan sehingga tingkat suku bunga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dana yang diambil langsung dari masyarakat. (*)

Permudah UMKM Dapatkan KUR



Komite IV DPD RI melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait di Medan, Sumatera Utara, dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2022 tentang APBN 2022 yang difokuskan mengenai realisasi KUR dan pertumbuhan UMKM di daerah. (Foto Sekjen DPD RI)

Komite IV DPD RI meminta pemerintah mempermudah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR). Sebab, selama ini, pelaku UMKM masih mengalami kesulitan untuk mengakses KUR tersebut.

Ketua Komite IV Elviana menyebutkan setidaknya ada lima permasalahan penyaluran KUR kepada UMKM. Salah satu kendalanya yang dialami pelaku UMKM dalam mengajukan KUR adalah masalah administrasi.

“Masalah lainnya, yaitu masih ditemukan penerima KUR itu umumnya nasabah bank yang memang sudah *bankable*, yang selama ini sudah mendapatkan kredit bank dengan bunga komersial. Sementara yang lain kesulitan mendapatkan KUR dengan berbagai alasan,” ungkap Elviana saat memimpin kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Medan, Senin pekan kedua September 2022.

Suara senada juga disampaikan sejumlah Senator terkait susahnyanya pelaku UMKM untuk mendapatkan KUR tersebut. Padahal mereka membutuhkan modal usaha karena terdampak pandemi Covid-19. Akhirnya mereka mencari jalan pintas untuk mendapat modal usaha melalui pinjaman online atau pinjol.

“Masalah yang paling sering dialami UMKM adalah minimnya modal usaha karena dampak pandemi Covid-19 selama ini sehingga kegiatan terhambat. Kendala UMKM ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” kata Iskandar Muda Baharuddin Lopa, senator asal Sulbar.

“Sorotan DPD RI terhadap KUR adalah suatu hal yang perlu kita upayakan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mencegah dampak negatif faktor geopolitik global,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Doddy Zulverdi, merespon apa yang di-suarakan Komite IV DPD RI. (*)

Pengaduan Konflik Tanah

Terus Mengalir ke DPD RI



BAP DPD RI menerima pengaduan sengketa lain dari masyarakat Desa Sekoban Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah masyarakat Desa Tanjung Kupang Baru, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. (Foto Setjen DPD RI)

Pengaduan konflik lahan yang terjadi di daerah terus mengalir ke Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI. Terbaru adalah pengaduan masyarakat Desa Sekoban Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah dengan PT Pancaran Wana Nusa (PWN), dan konflik lahan masyarakat Desa Tanjung Kupang Baru, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan dengan PT Sawit Mas Sejahtera (SMS).

Perselisihan masyarakat Desa Sekoban dengan PT Pancaran Wana Nusa (PWN) karena lahan

yang diklaim PT PWN di atas lahan yang sudah lama digarap oleh masyarakat Desa Sekoban seluas 2.500 Ha. Sedangkan sengketa lahan HGU PT (SMS) mengklaim sebagian lahan dalam area HGUnya lahan masyarakat seluas 520 Ha yang sudah berlangsung selama 30 tahun.

“BAP menampung dan menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat terkait dengan korupsi dan maladministrasi yang masalahnya berkaitan dengan kepentingan daerah dengan melibatkan lintas Komite. Tentu kami konsultasikan dulu dengan Pim-

pinan DPD RI,” kata Ketua BAP Ajiep Padindang, Rabu akhir Agustus 2022.

Kepada kedua kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan itu, diminta melengkapi semua data yang diperlukan BAP DPD RI untuk menjadi bahan analisa secara mendalam.

“Agar dapat ditindaklanjuti, kami BAP membutuhkan semua data-data yang lengkap, beserta kronologis agar segera dapat ditindaklanjuti dan mendapatkan titik terang,” kata Wakil Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno. (*)

Blok Masela Hanya Diganti Rp14 Ribu/Meter



Pimpinan BAP DPD RI dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (kedua dari kiri) dalam RDP dengan dengan sejumlah pihak membahas soal ganti rugi lahan masyarakat untuk pembangunan Blok Masela di Maluku, Rabu pekan kedua September 2022. (Foto Setjen DPD RI)

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mendukung pembangunan proyek Migas Blok Masela di Lermatang Kabupaten Tanimbar, Maluku. Karena proyek strategis nasional itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat setempat dan Indonesia secara umum.

Namun dalam penyelesaian ganti rugi lahan milik masyarakat yang digunakan untuk Blok Masela itu tentu harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat setempat. Penetapan harga ganti rugi sebesar

Rp14.000 per meter yang ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dinilai terlalu rendah.

“Kami menemukan ada masalah dalam penetapan harga yang dilakukan oleh panitia tanpa melibatkan Pemda Tanimbar dalam keputusan tersebut,” kata Ketua BAP DPD RI Ajiep Padindang dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait soal ganti rugi lahan untuk pembangunan Blok Masela tersebut, Rabu pekan kedua September 2022.

Wakil Ketua I DPD RI Nono

Sampono yang ikut dalam rapat tersebut menyampaikan kekecewaannya atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tentang penetapan harga ganti rugi tanah sebesar Rp172.000 per meter dan kembali ke harga semula Rp14.000/ meter.

“Harga Rp14.000 untuk satu meter tanah itu sangat merugikan rakyat Maluku. Terlebih lagi di kawasan pembangunan itu merupakan tanah adat dan sumber pencaharian bagi masyarakat setempat,” kata senator dari Maluku itu. (*)

BULD Soroti Masalah Perizinan Tambang di Daerah



Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow (ketiga dari kanan) dan sejumlah senator bersama pakar di bidang pertambangan usai menggelar rapat dengar pendapat membahas masalah izin pertambangan di daerah. (Foto Setjen DPD RI)

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menilai, perlu adanya perbaikan regulasi perizinan di sektor pertambangan dan kehutanan di daerah. Problematika tersebut terjadi karena adanya perubahan pengalihan kewenangan dari daerah ke pusat, seiring lahirnya UU Cipta Kerja.

“Terkait permasalahan peralihan kewenangan perizinan ini, daerah harus menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya,” kata Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow saat rapat dengar pendapat dengan pakar pertambangan, Rabu pertengahan September 2022.

Berbagai persoalan pertambangan ini banyak di-suarakan para anggota BULD. Sukiryanto misalnya, di daerah pilihannya, Kalimantan Barat, banyak perusahaan asing yang melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mengindahkan dan memberikan manfaat bagi daerah.

GKR Hemas menilai persoalan pencabutan izin dari daerah ke pusat bukan menjadi solusi. Dia mencontohkan di daerah pilihannya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ada penambangan pasir di sekitar kawasan Merapi sampai merusak daerah evakuasi. Pemberian izinnya harus ditinjau ulang karena telah merusak lingkungan.

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Faisal Amri menyebut masalah perizinan tambang selalu menimbulkan permasalahan, baik dikelola pusat ataupun daerah. Menurutnya yang harus menjadi fokus perhatian adalah bagaimana eksploitasi SDA tersebut memberikan manfaat bagi daerah.

“Tata kelola SDA di daerah ini butuh intervensi luar biasa karena ini menyangkut masyarakat di daerah. Saya kira jika DPD RI bisa mendorong dan mencari solusi akan permasalahan ini akan luar biasa efeknya bagi daerah,” kata pakar hukum pertambangan dari Universitas Tarumanegara Jakarta Ahmad Redi.(*)

BKSP DPD RI Gelar Forum Sinergi Dubes dan Daerah



Dari kiri Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, Wakil Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Belanda di Jakarta Natasja A.M. Van Der Gest, Ketua BKSP Sylviana Murni dan Wakil Ketua BKSP Gusti Farid Hasan Aman dalam acara Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah (FSDBD) Tahun 2022 bertema “Memperkuat Rantai Nilai Global atau Global Value Chains (GVC) Industri Kalimantan Timur dalam Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Belanda”, di Balikpapan, Kamis pekan keempat September 2022. (Foto Setjen DPD RI)

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI menggelar Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah (FSDBD) Tahun 2022 bertema “Memperkuat Rantai Nilai Global atau Global Value Chains (GVC) Industri Kalimantan Timur dalam Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Belanda”, di Balikpapan, Kamis pekan keempat September 2022.

“BKSP akan terus memfasilitasi kerja sama daerah dengan mitra strategis di luar negeri, termasuk melalui forum sinergi ini. Melalui forum ini dapat mengidentifikasi peluang-peluang kerja sama dalam konteks rantai nilai global antara kedua negara,” kata Ketua BKSP

DPD RI Sylviana Murni.

“Forumnya jangan berhenti sampai di sini, harus kemitraan dengan Belanda nanti khususnya di Kaltim sebagai daerah penyangga utama IKN nanti. Indonesia harus berbasis industri, jangan hanya menjual *raw material*, tetapi ke depan harus memikirkan juga sumber daya yang bisa diperbaharui juga, pembangunan IKN harus kita kawal,” kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat memberikan *keynote speech* pada forum tersebut.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengapresiasi BKSP DPD RI dengan mengi-

nisiasi acara tersebut di Kaltim. Rantai nilai global industri Kalimantan Timur dalam kemitraan ekonomi Indonesia Belanda diharapkan memberikan dampak besar bagi daerahnya.

“Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan peluang investasi yang terbilang luas di sektor-sektor seperti minyak dan gas, manufaktur, konstruksi, serta pertanian dan perikanan. Kalimantan Timur memiliki banyak peluang untuk saling menguntungkan dengan perusahaan dan institusi dari negara Belanda,” kata Wakil Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Belanda di Jakarta Natasja A.M. Van Der Gest. (*)

Kasus BLBI **Membuat *Chaos*** **Keuangan Negara**





Ketua Pansus BLBI DPD RI Bustami Zainudin (tengah) didampingi Wakil Ketua Pansus BLBI DPD RI Sukiryanto (kiri) saat melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Gubernur BI (2003 - 2008) Burhanuddin Abdullah. (Foto Setjen DPD RI)

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga saat ini belum terselesaikan. Pemerintah masih menanggung rekap bunga obligasi BLBI sekitar Rp48 triliun per Juni 2022.

Karena itu, Ketua Pansus BLBI DPD RI Bustami Zainudin mengharapkan tidak terulang lagi kasus serupa di kemudian hari. Karena kasus BLBI itu telah membuat *chaos* keuangan negara. Sebab, dia melihat pola serupa yang terjadi untuk merampok uang negara.

“Kami menangkap pola yang sama terjadi pada Jiwasraya, Bumiputera, Asabri. Pola-pola *ngebancak* (merampok) uang negara. Menurut kita, orang tidak mau bayar, buat *chaos* negara. Sementara yang kami tangkap ini. Negara nanti yang bayar,” kata Bustami dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Gubernur Bank Indonesia periode 2003 - 2008 Burhanuddin Abdullah, baru-baru ini.



Gubernur Bang Indonesia periode 2003 - 2008 Burhanuddin Abdullah saat rapat dengar pendapat umum dengan Pansus BLBI DPD RI. (Foto Setjen DPD RI)

“Kondisi uang ini yang kami kejar karena ada bunga utang obligasi rekap yang harus dibayar oleh rakyat melalui APBN setiap tahun. Ini sampai kapan?” tegas Wakil Ketua Pansus BLBI DPD RI Sukiryanto.

Burhanuddin Abdullah dengan tegas menyatakan dirinya tidak pernah mengambil kebijakan ten-

tang BLBI tersebut. Dia menjelaskan latar belakang adanya BLBI tersebut, yaitu krisis moneter yang terjadi pada 1997/1998. Krisis perbankan terjadi ketika nilai kurs rupiah terhadap US Dollar dilepas kepada mekanisme mengambang. Bank-bank besar yang punya utang dollar yang sebelumnya membayar sebesar Rp2.500 harus membayar Rp15.000 per dollar. (*)

Penghargaan dari Menteri Keuangan



Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan ucapan selamat kepada Sekjen DPD RI Rahman Hadi atas prestasi yang diraih Setjen DPD RI mempertahankan opini WTP untuk 16 kali berturut-turut. (Foto Setjen DPD RI)

DPD RI memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan karena memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 16 kali berturut-turut. Penghargaan diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kamis pekan keempat September 2022.

DPD RI selalu memperoleh capaian opini WTP dari BPK RI sejak tahun pelaporan keuangan tahun 2006. Untuk laporan keuangan di tahun 2021, DPD RI kembali memperoleh predikat opini WTP yang ke-16.

“Penghargaan ini merupakan kado bagi ulang tahun DPD RI yang ke-18. Prestasi ini tidak lepas dari kerja keras, kerja cerdas, kerja tertib, dan proses kolaboratif di lingkungan Sekretariat Jenderal

DPD RI,” kata Rahman Hadi.

Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir mengatakan, raihan WTP 16 kali berturut-turut menjadi salah satu indikator keberhasilan lembaga DPD RI dalam tata kelola keuangan negara. Capaian tersebut harus menjadi pemicu semangat untuk dalam mewujudkan visi Setjen DPD RI sebagai *supporting system* parlemen yang profesional, akuntabel, dan modern. (*)

Sekjen DPD RI Terima Delegasi Arab Saudi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Rahman Hadi menerima kunjungan delegasi dari Arab Saudi, Selasa pekan keempat September 2022. Kunjungan tersebut membahas pengembangan potensi investasi di Indonesia di beberapa sektor.



Sekjen DPD RI Rahman Hadi (tengah) didampingi Deputy Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir (ketiga dari kanan), Kepala Biro Perencanaan Keuangan Hartawan (kedua dari kanan) dan Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Mahyu Darma (paling kanan) foto bersama dengan pimpinan delegasi dari Arab Saudi. (Foto: Setjen DPD RI)



Setjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir ketika menerima delegasi dari Arab Saudi. (Foto Setjen DPD RI)

Rahman Hadi menyambut baik tujuan delegasi Arab Saudi yang datang ke Indonesia untuk berinvestasi di beberapa sektor. Pihaknya mengaku siap jika dibutuhkan dalam memfasilitasi pertemuan dengan berbagai kementerian terkait.

“Jika mau bertemu dengan kementerian terkait kami siap membantu, seperti Kementerian Perdagangan atau bertemu de-

ngan kementerian lain kita akan berusaha untuk memfasilitasi juga,” kata Rahman Hadi.

Rahman Hadi membeberkan potensi-potensi investasi di beberapa daerah, seperti Lampung, Jawa Barat, atau Nusa Tenggara Barat. Investasi bisa di mana saja karena daerah-daerah di Indonesia memiliki begitu banyak potensi untuk diinvestasikan.

Deputi Bidang Administrasi

Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir menambahkan, DPD RI siap memfasilitasi pihak investor dengan mengundang pengusaha lokal, gubernur, dan bupati.

Pimpinan Delegasi Arab Saudi Syekh Abu Badar menjelaskan, rombongan mereka sebanyak 70 orang. Mereka minta diagenda-kan pertemuan khusus dengan anggota DPD RI. Mereka juga siap difasilitasi untuk bertemu dengan kementerian. (*)

Raker dengan Komisi III, **Ada Tambahan Belanja?**



Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. (Foto: Sesjen DPD RI)

Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2023 untuk kementerian/lembaga, Rabu pekan keempat September 2022.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah mendukung usul penambahan anggaran DPD

RI pada rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI pada 7 September lalu,” kata Rahman Hadi.

Rahman Hadi menjelaskan berdasarkan surat Badan Anggaran DPR RI tanggal 20 September 2022, pihaknya telah menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka pembicaraan tingkat I.

Berdasarkan surat tersebut bahwa pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2023, pagu anggaran DPD RI mendapatkan tambahan belanja.

Penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan. Selain itu penambahan anggaran itu juga akan digunakan sebagai program dukungan manajemen. (*)

PERSIAPAN MENGHADAPI RESESI EKONOMI DUNIA

Rindang Mustikawati

(Analisis Legislatif di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran-Setjen
DPD RI/rindang2401@gmail.com)



Berbagai Negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia saat ini sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, hal ini dipicu adanya berbagai problematika yang sedang dihadapi saat ini. Munculnya virus Covid-19 yang menyebar luas di berbagai belahan dunia menyebabkan kelumpuhan diberbagai sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi. Pandemi Covid-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Perang dagang antara Cina - Amerika Serikat juga mempengaruhi perekonomian dunia terutama Indonesia. Selain itu perang antara Rusia-Ukraina yang tidak kunjung berakhir.

Resesi menurut KBBI adalah “kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya (seolah-olah terhenti); menurunnya (mundurnya, berkurangnya) kegiatan dagang (industri)” sedangkan menurut National Bureau of Economic Research (NBER) yang ditulis oleh Wangi Sintya Mangukuto (2019) di laman *website* CNBC Indonesia mendefinisikan resesi sebagai periode jatuhnya aktivitas ekonomi, tersebar di seluruh ekonomi dan berlangsung selama lebih dari beberapa bulan, maka dari apa yang sudah dituliskan itu dapat disimpulkan bahwa negara dapat mengalami resesi karena adanya sebuah ketidakstabilan ekonomi sehingga ekonomi mengalami penurunan selama dua kuartal dalam beberapa bulan.

Tanda-tanda resesi ekonomi salah

satunya adalah inflasi. Inflasi merupakan kondisi naiknya harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi yang berlebihan membuat daya beli masyarakat melemah. Di lain sisi, produksi barang dan jasa bakal menurun. Ini masuk dalam kategori berbahaya karena akan memicu pengangguran, kemiskinan, dan berujung pada resesi. Pada Juli lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan proyeksi inflasi global sepanjang 2022 menjadi 6,6 persen bagi negara maju, dari sebelumnya 0,9 persen pada proyeksi April 2022. Untuk negara berkembang, IMF memperkirakan laju inflasi akan mencapai 9,5 persen pada 2022, atau naik 0,8 persen dari proyeksi sebelumnya.

Inflasi yang melambung membuat bank sentral harus menaikkan suku bunganya. Masalahnya, dua hal tersebut diperparah dengan daya beli yang mulai lesu dan bakal menjadi pemantik resesi. Suku bunga yang tinggi berfungsi untuk melindungi nilai mata uang, tapi ini akan membebani debitur dan menyebabkan kredit macet. Jika terjadi secara besar-besaran, perbankan bisa kolaps. Saat ini, bank sentral di berbagai negara mulai menaikkan suku bunga acuan-nya secara agresif dan cepat. Sebagai catatan, bank sentral AS Federal Reserve telah menaikkan suku bunga acuannya (Fed Fund Rate/FFR) pada 22 September 2022. The Fed kembali menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis points (bps) atau 0,75 per-



sen menjadi 3,0-3,25 persen. Dari catatan CNBC Indonesia, kenaikan suku bunga The Fed ini merupakan kenaikan yang kelima kalinya selama tahun 2022.

Saat ini, beberapa negara maju seperti AS dan China mulai mengalami kontraksi ekonomi pada kuartal II-2022. Ekonomi AS mengalami kontraksi sebesar 0,6 persen secara tahunan (*year-on-year/yoy*) pada kuartal kedua. Pertumbuhan ekonomi China melambat pada kuartal II-2022. Kenaikan produk domestik bruto (PDB) secara tahunan (*yoy*) pada kuartal kedua hanya sebesar 0,4%. Berdasarkan data Biro Statistik China yang dirilis pada Jumat (15/7/2022), pertumbuhan PDB tersebut jauh di bawah pertumbuhan pada kuartal I-2022 yang mencapai 4,8%. Catatan itu juga jauh di bawah konsensus pasar sebesar 1%.

Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual menyebut pelemahan ekonomi global sudah mulai terlihat dari aktivitas Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur global yang turun dari

51,1 ke 50,3 pada Agustus 2022. Dari negara-negara G20 dan ASEAN-6, hanya 24% saja yang aktivitas manufakturnya masih di level ekspansi dan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Mereka adalah Indonesia, Thailand, Filipina, Rusia, Vietnam dan Arab Saudi. "Hanya 24% dari negara G20 dan ASEAN-6, artinya mayoritas melambat dan kontraksi. Indonesia dengan kelima negara yang lain masih pada level yang akseleratif. Ini hal yang cukup positif tapi kita juga sangat menyadari lingkungan global kita mengalami pelemahan," tuturnya.

Melihat kemungkinan jalur perlambatan ekonomi tetap berlangsung, diperlukan kebijakan yang tepat. Kebijakan Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga acuan serta mendorong kecukupan likuiditas di pasar menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penurunan rasio *Loan to Value* (LTV) ataupun *Financing to Value* (FTV) yang dikeluarkan BI juga menjadi angin segar dalam men-

stimulus permintaan terhadap sektor riil. Dengan dukungan tersebut, diharapkan sektor riil bukan hanya dapat bertahan dari risiko perlambatan ekonomi. Tetapi juga dapat menciptakan momentum ekspansi demi memperbaiki kinerja ekspor dan neraca perdagangan Indonesia.

Dari sisi fiskal, pemerintah harus mengolaborasikan program-program antar kementerian. Selama ini, program antar kementerian terkesan berjalan sendiri-sendiri. Dari pemetaan terhadap populasi program pemberdayaan UMKM, setidaknya terdapat 21 program pemberdayaan UMKM di bawah 19 Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah berjalan cukup lama (*sustainable*) dengan nilai anggaran dan jumlah penerima/peserta program yang relatif besar, serta menyasar kelompok rentan (miskin, perempuan). Banyaknya program yang menyebar ke beberapa kementerian lembaga ini menyebabkan terjadinya potensi tumpang tindih jenis program dan penerima bantuan terkait basis data dikarenakan tidak ada koordinasi lintas K/L. (*)

Menyoal Soliditas Kepemimpinan DPD RI

Oleh : Yorrys Raweyai

Sejak kelahirannya pada 2004 silam, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai lembaga yang mengemuka pasca amendemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia 1945, sekaligus merespon geliat reformasi yang memikirkan ulang pentingnya aspirasi daerah menuai resonansi di tingkat nasional, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Lembaga parlemen dalam upaya membangun sistem bikameral (dua kamar) ini perlahan tidak lagi semata sebagai pelengkap sistem yang telah ada sebelumnya.

Pada periode 2019-2024 ini, signifikansi itu semakin terasa seiring dengan kepercayaan publik yang semakin me-ningkat di angka 64,6 % di atas DPR RI. Hal itu tidak terlepas dari harapan publik yang

dijawab dengan kerja keras, terukur dan terencana dari para Anggota DPD RI yang saat ini berjumlah 136 orang. Juga tidak terlepas dari semangat yang tinggi dari segenap Pimpinan DPD RI di awal masa kepemimpinannya yang menggelorakan slogan DPD RI: Dari Daerah untuk Indonesia.

Namun di tengah suasana kondusif tersebut, kita memang masih dihadapkan dengan situasi yang tidak sepenuhnya maksimal. Selain Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, juga sistem dua kamar belum sepenuhnya maksimal berjalan sebagaimana idealisme yang bersarang di kepala kita masing-masing. Tapi, tentu itu bukan penghalang. Sebab dinamika sosial dan politik harus dilalui dengan berbagai terobosan demi terobosan, meski harus mampu bernegosiasi dengan kenyataan saat ini.

Paling tidak, kita menyaksikan euforia yang positif dari mereka yang sedang menjabat saat ini. Selain terdiri dari kaum muda yang relatif dominan, juga didukung oleh keberadaan figur-figur yang selama ini malang-melintang di dunia birokrasi, eks-pentolan politisi aktif dari partai-partai besar, serta para tokoh masyarakat dan agama yang selama ini akrab dengan masyarakat daerah.

Kita sesungguhnya sangat patut berharap banyak pada figur-figur Anggota DPD RI periode 2019 - 2024. Mereka mampu menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien dengan DPR RI maupun Pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Apalagi secara yuridis, para Anggota DPD RI sepenuhnya terlepas dari ikatan partai politik yang terkadang mengurangi independensi individual dengan berbagai ide dan gagasan yang murni lahir dari keresahan rakyat di daerah. Slogan 'Dari Daerah untuk Indonesia' pun kiranya bukan impian yang muluk-muluk.

Meski berada dalam situasi yang relatif kondusif dan berada dalam jalur (*on the track*) yang sewajarnya, saat ini kita dihadapkan pada situasi isu sekaligus kenyataan yang mengundang pertanyaan. Berawal dari manajemen kepemimpinan DPD RI yang seringkali mengundang pertanyaan para Anggota DPD RI, hingga pada isu tentang keretakan hubungan antara Pimpinan DPD RI yang semakin lama kian berhembus kencang. Puncaknya saat mosi tidak percaya kepada Fadel Muhammad



yang berujung pada sidang Paripurna ke-2 DPD RI yang mengagendakan pencopotan dan pemilihan ulang jabatan Wakil Ketua MPR RI dari Unsur DPD RI pada 18 Agustus 2022.

Setelah pemilihan panjang hingga dini hari yang menghasilkan Tamsil Linrung dengan suara terbanyak, persoalan pergantian tersebut tidak selesai sampai di situ. Pada kelanjutannya, Fadel Muhammad melayangkan gugatan atas pencopotannya, dan secara khusus menggugat LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai figur yang bertanggung jawab atas pencopotannya.

Terlepas dari mekanisme hukum yang sedang dijalani saat ini, kabar tentang penarikan kesepakatan atas pencopotan Fadel Muhammad menambah kerumitan tersendiri dalam tatanan kolektivitas kepemimpinan DPD RI. Tersirat secara jelas, kepemimpinan DPD RI saat ini sedang dirundung persoalan soliditas dan solidaritas antara satu sama lain. Selain itu, kedua persoalan tersebut sejatinya menambah deret persoalan tentang sejauhmana suasana kolektivitas dan kolegialitas sebagai wujud keseimbangan 4 wilayah yang sedang menaungi nakhoda perahu DPD RI saat ini, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPD RI.

Pada gilirannya, kita sulit membayangkan suasana ini mampu menjembatani harapan dan amanah Anggota DPD RI secara keseluruhan. Kita pun sulit mencerna dengan baik, bagaimana mungkin tugas-tugas kepemimpinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Peraturan DPD RI dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan

keputusan yang arif dan bijaksana untuk rakyat di daerah dengan berbagai kompleksitas persoalan yang sedang mendera saat ini?

Sementara itu, hasil paripurna yang merupakan pengambilan keputusan tertinggi di lembaga DPD RI seakan surut sebelum berkembang. Penolakan kelembagaan MPR RI saat ini untuk segera mengesahkan Saudara Tamsil Linrung sebagai pengganti Saudara Fadel Muhammad cukup membuktikan betapa keputusan tertinggi DPD RI masih bisa dimentahkan. Sementara itu, penarikan kesepakatan oleh 2 (dua) Wakil Ketua/Pimpinan DPD RI seakan menghilangkan wajah konsisten DPD RI di mata lembaga-lembaga lainnya, termasuk para Anggota DPD RI itu sendiri. Pemikiran terburuk saat ini, keputusan tertinggi DPD RI tersebut ibarat dagelan yang sekedar memuaskan kepentingan sesaat, dan tidak kunjung berbuah efektif.

Mencermati suasana saat ini, sebagai Anggota DPD RI, mewakili suara-suara sayup sekian banyak Anggota lainnya, kita berharap suasana ini tidak larut dalam kesenyapan hingga menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga terhormat ini. Kita menyadari sepenuhnya, tidak lama lagi perhelatan politik Pemilu 2024 akan kita rayakan bersama sebagai pesta demokrasi rakyat. Dan, tentu saja rakyat di daerah yang paling merasakan perayaan ini. Entah apa yang akan kita wafatkan sebagai kerja keras dalam 1 periode ini, jika soliditas dan solidaritas kita sedang terpecah dan terbelah.

Tentu saja kepemimpinan menjadi teladan penting dalam kelembagaan DPD RI. Hal ini berbeda dengan DPR RI yang cenderung

memiliki kekuatan merata di bawah naungan partai politiknya masing-masing. Sementara DPD RI begitu berharap kepemimpinannya mampu membawa suasana yang lebih baik dan menghasilkan kebanggaan sebagai Anggota DPD RI.

Sudah saatnya kita memikirkan kembali peran, fungsi dan tanggung jawab kita masing-masing di hadapan rakyat. Menghilangkan ego sektoral dengan basis kepentingan masing-masing di bawah kepentingan lembaga, adalah idealisme utama yang selayaknya dijunjung saat ini. Sebab, bagaimanapun, masa 18 tahun DPD RI seharusnya menjadi pengingat, betapa amanah reformasi sedang berada di pundak kita masing-masing. Hal itu akan terakselerasi dengan maksimal dalam suasana kebersamaan dan kehangatan, sebagaimana kelaziman rakyat di daerah yang sebagian besar hidup dengan kebersamaan dan kehangatan, jauh dari hiruk-pikuk kontestasi yang terkadang menguras tenaga, energi dan pikiran.

Saatnya kembali merenungi slogan “Dari Daerah untuk Indonesia”. Kalimat yang lahir dari semangat kedaerahan yang berbeda-beda tapi satu jua. Meski berbeda pandangan, tapi satu tujuan. Walau berbeda asal-usul daerah tapi satu visi tentang kebangsaan dan keindonesiaan. Itulah makna sebagian penggalan sumpah dan janji kita saat dilantik, bahwa kita ‘akan bekerja sungguh-sungguh demi tegaknya demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan daerah di atas kepentingan pribadi, seseorang dan golongan’ (*).

(Penulis adalah Anggota DPD RI Dapil Papua Periode 2019-2024 dan tulisan ini sudah dimuat di detikNews, Kamis, 15 Sep 2022)

Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si., M.Kesos: Senator Muda dari Papua Barat



Mamberob Yosephus Rumakiek S.Si., M.Kesos:

Dalam usia muda, 38 tahun, ia sudah berkiprah di Se-nayan sebagai senator alias anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Mamberob Yosephus Rumakiek namanya.

Lahir 16 Maret 1979 di Sorong, Papua Barat, Mamberob berhasil ke Senayan melalui Pengganti Antar Waktu (PAW) dan mulai menjabat pada tanggal 30 Januari 2017. Ia

berlatar belakang aktivis mahasiswa dan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Pada Pemilu 2019, dia terpilih kembali sebagai Anggota DPD RI periode 2019-2024 dari dapil Papua Barat dengan perolehan suara terbanyak.

Mamberob yang bergelar akademis S.Si., M.Kesos, ini menghabiskan masa kecil dan remajanya di Papua, tepatnya di Sorong. Pendidikan sekolah

dasar hingga sekolah menengah atas didapatkan di Sorong hingga akhirnya pada tahun 1997 dia harus merantau ke Jayapura menempuh studi sarjana di STT GKI “I.S.KIJNE” Jayapura.

Mamberob mulai aktif di organisasi pergerakan mahasiswa sejak awal kuliah hingga ditunjuk sebagai Ketua Senat. Selain organisasi kampus, Dia juga aktif dalam organisasi ekstra kam-

pus di GMKI Jayapura. Menjabat sebagai Sekretaris Cabang di GMKI Jayapura, pada tahun 2006 ia kemudian beranjak ke Jakarta dan menjadi Pengurus Pusat GMKI.

Aktif di organisasi mahasiswa tingkat nasional bukanlah hal yang mudah, kondisi dinamika organisasi tingkat nasional sangatlah jauh berbeda dengan yang ada di daerahnya. Mamberob diberikan kepercayaan pada Kongres XXXI GMKI di Surabaya 2008 sebagai Ketua Umum GMKI. Dirinya merupakan putra Papua pertama yang menjabat sebagai Ketua Umum GMKI. Hal ini merupakan pencapaian tertingginya selama aktif di organisasi pergerakan mahasiswa. Tahun 2005, Mamberob menamatkan studi magisternya di Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.

Dunia politik bukanlah hal yang baru bagi Mamberob. Pengalamannya di organisasi mahasiswa sedikit banyak telah memberikan pengetahuan yang memadai mengenai dunia politik. Tekad yang kuat untuk membenahi Papua Barat diwujudkan dengan maju menjadi calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat pada tahun 2014. Hasil penghitungan suara menempatkannya di posisi ke-5 dan kemudian masuk sebagai Anggota DPD RI PAW tahun 2017 menggantikan Abdullah Manaray.

Selama aktif menjadi Anggota DPD RI, ia diberikan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI tahun 2018-2019 dan Wakil Ketua Pansus Tenaga Kerja Asing DPD RI tahun 2018. Mamberob banyak mengadvokasi nelayan di daerah Papua Barat.

BIODATA

- **Nama lengkap** : Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M. Kesos.
- **TTL** : Sorong, 16 Maret 1979

Pendidikan

- SD YPK Eucharistia Klamono
- SMP Negeri Beraur - Klamono
- SMU Negeri 2 Sorong
- STT GKI "I.S.KIJNE" Jayapura
- Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia

Riwayat Organisasi

- Ketua Bidang di DPP KNPI (2014 -2018)
- Pengurus Yayasan Bina Darma (2011-2016), (2016-2021)
- Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (2008-2010)
- Sekretaris Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (2006-2008)
- Sekretaris Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia - Jayapura (2004-2006)
- Ketua Senat Mahasiswa STT GKI "I.S.KIJNE" Jayapura (2001-2002)

Riwayat Pekerjaan

- Anggota DPD RI terpilih (2019-2024) Dapil Papua Barat
- Anggota DPD RI PAW (2017-2019) Dapil Papua Barat
- Staf Ahli Anggota DPR RI (Fraksi Partai Demokrat) 2014 -2016.

Mamberob mempertanyakan alokasi bantuan alat tangkap dari pemerintah melalui Kementerian KKP kepada Provinsi Papua Barat masih belum adil. Program pemberdayaan nelayan masih dibutuhkan oleh nelayan di Papua Barat. Masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan juga disorot oleh Mamberob. Ia menyinggung masalah kesejahteraan

tenaga medis dan guru yang masih kurang utamanya untuk akses tempat tinggal.

Ada banyak tenaga medis yang tempat tinggalnya jauh dari pusat pelayanan kesehatan (puskesmas), begitu juga guru yang terpaksa harus tinggal di sekolah agar tetap dapat mengajar. (* /wikipedia.com)



Pimpinan dan anggota DPRD RI usai Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-1 DPRD RI, Selasa, pekan ketiga September 2022. (Foto Setjen DPRD RI)



Ketua DPRD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) memberikan ucapan selamat kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang dikukuhkan sebagai Warga Kehormatan Utama organisasi itu pada acara puncak Perayaan Satu Abad PSHT di Graha Krida Budaya Padepokan Agung, Madiun, Jawa Timur, Jumat awal September 2022. (Foto Setjen DPRD RI)



Wakil Ketua DPRD RI Nono Sampono bersama anggota DPRD RI dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein dalam dialog kemaritiman di Bangka Belitung, Kamis pekan kedua September 2022. Pada kesempatan itu, Nono mengatakan Indonesia mempunyai peran strategis di kawasan Asia Pasific dalam tujuan poros maritim dunia. (Foto Setjen DPRD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi anggota DPD RI Bustami Zainudin ketika menerima kunjungan Jaksa Agung ST Burhanuddin di rumah dinas Ketua DPD RI, Minggu pekan pertama September 2022. Pada kesempatan itu, LaNyalla menyampaikan peta jalan mengembalikan kedaulatan rakyat kepada Jaksa Agung. (Foto Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama sejumlah anggota DPD RI dalam kunjungan ke Kota Batam, Kepulauan Riau akhir Agustus 2022 lalu. Dalam kunjungannya itu, Mahyudin dan rombongan mengadakan sesi foto bersama dengan pejabat setempat. (Foto: Setjen DPD RI)



Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI Mahyu Dharma bersama Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty dan sejumlah pejabat di lingkungan Setjen DPD RI, dalam kegiatan jumpa pers di Plaza DPD RI, Selasa pertengahan September 2022 lalu. (Foto Senator/Syafрил Amir)



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

Hari Kesaktian
PANCASILA

1 OKTOBER 2019

